

# Rencana Kinerja

**2025**



**Budgeting**

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri  
Jl. Ki Mangunsarkoro No. 6 Semarang

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peran Kementerian Perindustrian dalam mendorong kemajuan industri nasional sebagai pilar perekonomian nasional sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 diantaranya dengan mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju, serta Industri Hijau. Dalam membangun peta jalan perindustrian yang berkesinambungan, Pemerintah telah menetapkan pembangunan industri untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan dalam tiga tahapan dimana pada tahap ketiga (2025-2035) arah rencana pembangunan industri nasional dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Dengan adanya transformasi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) menjadi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) sesuai perubahan reorganisasi Kemenperin berdasarkan Perpres 107 Tahun 2020 serta mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, BSKJI memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri.

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) selaku unit pelaksana teknis di bawah BSKJI Kementerian Perindustrian, dalam penentuan visi organisasi kedepan visi ditetapkan secara selaras untuk mendukung pencapaian visi Presiden terpilih dan selaras dengan visi Kemenperin dan BSKJI. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Visi BBSPJPPI kedepannya ditetapkan **“Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing”**. Dalam visi tersebut mengandung pengertian bahwa kedepannya BBSPJPPI akan fokus serta senantiasa berupaya menjadi institusi yang profesional, terpercaya, dengan didukung oleh unit layanan teknis sesuai kompetensi inti yang dimiliki BBSPJPPI maupun dengan berkolaborasi dengan pihak lain, mampu untuk menangani serta memenuhi kebutuhan industri di bidang standardisasi dan jasa industri yang sesuai dengan perkembangan regulasi maupun tuntutan pertumbuhan industri dalam upaya mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan industri secara berkelanjutan.

Dalam mendukung perwujudan visi BBSPJPPI, maka dirumuskan misi BBSPJPPI **“Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi**

**industri, jasa industri dan industri hijau**". Kedepannya BBSPJPPI diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung kebijakan penerapan standarisasi di sektor industri, secara mandiri maupun berkolaborasi dalam mendorong penerapan dan pemanfaatan teknologi yang mendukung pada penerapan standar industri hijau, implementasi industri 4.0 yang kesemuanya bermuara pada peningkatan kemandirian dan daya saing industri serta pertumbuhan industri secara berkelanjutan. Peranan BBSPJPPI kedepannya akan terasa krusial dalam mendukung pengembangan sektor industri. Saat ini, perhatian masyarakat global dan nasional terhadap aspek lingkungan menjadi salah satu tantangan bagi sektor industri. Strategi pembangunan industri di masa depan salah satunya diarahkan kepada industri hijau yang menekankan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan. Hal ini tentunya merupakan peluang bagi BBSPJPPI untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas jasa layanannya kepada masyarakat, khususnya sektor industri sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

#### **B. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kinerja BBSPJPPI TA 2025 dimaksudkan untuk menjabarkan sasaran dan kegiatan pada satker BBSPJPPI TA 2025 yang merupakan bagian tahapan pencapaian perencanaan berkelanjutan selama lima tahun kedepan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis 2025-2029 yang akan dilaksanakan oleh satker BBSPJPPI.

Penyusunan rencana kinerja juga ditujukan dalam rangka penyusunan kebijakan dan anggaran kedepannya, yang didalamnya turut memuat indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan yang merupakan perwujudan komitmen yang ingin dicapai satker BBSPJPPI di tahun 2025. Dokumen rencana kinerja sekaligus digunakan sebagai arahan dan pedoman kerja bagi pimpinan dan koordinator serta pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan TA 2025. Dengan demikian, diharapkan dapat implementasi penerapan akuntabilitas kinerja pada satker BBSPJPPI dapat terwujud.

#### **C. Tugas Pokok dan Fungsi**

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) yang dibentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri memiliki tugas melaksanakan standarisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BBSPJPPI akan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis, penerapan, dan pengawasan standardisasi di bidang pencegahan pencemaran industri;
- b. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- c. pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri 4.0, industri hijau, dan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- d. pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang pencegahan pencemaran industri;
- e. pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau di bidang pencegahan pencemaran industri;
- f. pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- g. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- h. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

#### **D. Ruang Lingkup**

Penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150 Tahun 2011. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka ruang lingkup dalam penyusunan dokumen Rencana Kinerja BBSPJPPI TA 2025 ini meliputi:

1. Hasil-hasil yang telah dicapai oleh satker BBSPJPPI selama periode tahun sebelumnya.
2. Arah kebijakan pengembangan satker BBSPJPPI kedepan, serta
3. Rencana kinerja satker BBSPJPPI tahun 2025 sebagai dasar pengajuan kebutuhan anggaran yang memuat sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.

## BAB II PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

### A. Hasil-hasil Pembangunan

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta sesuai dengan kompetensi di bidang teknologi pengolahan limbah, produksi bersih dan bioteknologi lingkungan melaksanakan kegiatan optimalisasi pemanfaatan teknologi di bidang pencegahan pencemaran industri sekaligus memberikan pelayanan jasa teknis di bidang pencegahan dan pengendalian pencemaran yang mendukung pada pembangunan industri hijau.

Terkait dengan pemberian layanan jasa teknis kepada masyarakat, maka untuk mendukung sistem pengelolaan keuangan yang lebih flexible sekaligus mengoptimalkan peran BBSPJPPI dalam pelaksanaan kegiatan operasional layanan jasa teknis yang mengutamakan prinsip efisiensi dan produktivitas, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 59/KMK.05/2010 tanggal 5 Pebruari 2010 BBSPJPPI telah ditetapkan sebagai satker yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Berpedoman pada kedua hal tersebut, maka ketersediaan pagu alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan BBSPJPPI bersumber dari dana Rupiah Murni dan dana PNPB tahun berjalan yang diperoleh dari pemberian layanan jasa teknis.

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Pagu Anggaran TA 2020-2024 (Rp. Ribu)**

Sumber Anggaran	Alokasi Anggaran (Rp.000)*				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rupiah Murni	14.266.241	15.913.545	16.689.022	17.511.625	19.065.620
PNPB Tahun Berjalan	13.610.557	13.773.243	15.005.000	14.900.000	15.500.000
<b>TOTAL</b>	<b>27.876.798</b>	<b>29.686.788</b>	<b>31.694.022</b>	<b>32.411.625</b>	<b>34.565.620</b>

Cat:

\*) Berdasarkan DIPA Revisi terakhir

Alokasi pagu anggaran yang tersedia dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis, diantaranya dengan melaksanakan kegiatan yang mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi industri melalui kerjasama penerapan hasil inovasi teknologi industri untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi industri terkait lingkungan. Untuk mendukung publikasi dan diseminasi atas kapabilitas/kompetensi BBSPJPPI di bidang penanganan dan pencegahan pencemaran lingkungan juga turut dilakukan promosi melalui partisipasi pada kegiatan pameran, pelaksanaan forum interaktif, serta pengelolaan media sosial balai.

Dari sisi aspek pemberian jasa layanan teknis, BBSPJPI juga mengupayakan pengembangan aspek kelembagaan internal BBSPJPI yang mendukung pada upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat khususnya sektor industri melalui penerapan prinsip Reformasi Birokrasi maupun melalui peningkatan kapabilitas kemampuan balai dalam pemberian jasa layanan teknis. Selama beberapa tahun terakhir potensi pendapatan/pembiayaan yang diperoleh dari penerimaan PNBPN pada tahun berjalan menunjukkan adanya peningkatan. Namun demikian adanya kejadian luar biasa Pandemi Covid-19 selama periode tahun 2020-2021, telah memberikan dampak terhadap realisasi penerimaan PNBPN pada tahun berjalan dimana realisasi penerimaan PNBPN pada 2020 hanya tercapai sebesar Rp. 8.770.372.009,- (58,51%) dan pada tahun 2021 tercapai sebesar Rp. 10.475.231.932,- atau 73,29% dari target. Namun demikian selama periode 2 (dua) tahun terakhir pasca masa pandemi pendapatan PNBPN dari realisasi pemberian jasa layanan menunjukkan peningkatan signifikan mendekati capaian sebelum pandemi dengan diantaranya capaian penerimaan PNBPN tahun 2023 melampaui target pendapatan yang ditetapkan (Rp. 16.283.712.001,- atau tercapai 109,28% melebihi target penerimaan PNBPN tahun 2023 yang ditetapkan sebesar Rp. 14.900.000.000,-).

**Tabel 2.2 Realisasi Penerimaan dan Realisasi Penggunaan**  
**Sumber Anggaran PNBPN**

<b>Uraian</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Target Penerimaan (Rp.000)</b>	12.962.436	14.987.778	14.292.000	15.005.000	14.900.000
<b>Realisasi Penerimaan (Rp.000)</b>	14.931.110	8.770.372	10.475.231	14.809.403	16.283.712
<b>Realisasi Penerimaan (%)</b>	115,19	58,51	73,29	98,69	109,28
<b>Pagu Belanja (Rp.000)</b>	17.962.436	13.610.557	13.773.243	15.005.000	14.900.000
<b>Realisasi Penggunaan (Rp.000)</b>	16.265.023 *	12.955.567 **	10.300.884	14.502.474	14.148.520
<b>Realisasi Penggunaan thp Penerimaan (%)</b>	108,93	147,71	98,33	97,92	86,88
<b>Realisasi Penggunaan thp Pagu Belanja (%)</b>	90,55	95,18	74,49	96,65	94,96

Cat:

\*) Pada tahun 2019 terdapat pemanfaatan/penggunaan saldo awal kas BLU sebesar Rp. 5.000.000.000,-

\*\*) Pada 2020, dikarenakan realisasi PNBPN BLU tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersumber dari PNBPN BLU (saldo awal kas yang telah digunakan tidak dapat dikembalikan karena target PNBPN tahun berjalan tidak tercapai) maka dilakukan revisi DIPA penggunaan saldo awal dalam rangka mismatch. Saldo awal kas yang digunakan sebesar Rp. 4.185.195.122,-

**Tabel 2.3. Target dan Realisasi Penerimaan PNBP Per Jenis Jasa Layanan 2021 – 2023**

NO	LAYANAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1.	Pengujian	12.000.000.000	8.357.687.102	11.855.000.000	12.363.794.906	12.350.000.000	13.048.236.788
2.	Kalibrasi	100.000.000	19.113.200	100.000.000	64.420.100	100.000.000	107.234.600
3.	Sertifikasi	1.500.000.000	1.728.717.200	1.750.000.000	1.829.718.250	1.800.000.000	2.164.998.671
4.	Bimbingan dan Pendampingan Teknis	150.000.000	103.552.100	150.000.000	211.470.200	150.000.000	315.230.000
5.	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	350.000.000	250.305.200	600.000.000	267.990.600	450.000.000	453.849.898
6.	Inspeksi Teknis dan Verifikasi Industri	142.000.000	0	500.000.000	0	100.000.000	0
7.	Penyelenggara Uji Profisiensi	0	0	0	0	0	125.044.200
8.	Penerimaan Lainnya (Jasa Giro)	50.000.000	15.857.130	50.000.000	72.009.192	50.000.000	69.117.844
<b>TOTAL</b>		<b>14.292.000.000</b>	<b>10.475.231.932</b>	<b>15.005.000.000</b>	<b>14.809.403.248</b>	<b>14.900.000.000</b>	<b>16.283.712.001</b>

Adapun capaian realisasi anggaran selama 5 (lima) tahun terakhir dan capaian indikator kinerja sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 2.4**  
**Perkembangan Realisasi Anggaran TA. 2019-2023**

	TA. 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
<b>Pagu (Rp.000)</b>	34.972.308	27.876.798	29.686.788	31.491.998	32.411.625
<b>Realisasi (Rp.000)</b>	32.985.880	26.464.865	25.907.016	30.939.394	31.593.377
<b>Realisasi (%)</b>	<b>94,32</b>	<b>94,94</b>	<b>87,27</b>	<b>98,24</b>	<b>97,48</b>

Cat:  
Berdasarkan DIPA Revisi terakhir

**Tabel 2.5**  
**Capaian Kinerja Renstra BBSPJPPI TA. 2023**

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Fisik			Keterangan
			Target	Satuan	Realisasi	
1.	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	2	Persen	80	Kegiatan Jasa Konsultansi Optimalisasi Proses Sistem Pengeringan Terkontrol . Kolaborasi Tiga Pihak : BBSPJPPI, PT. Retota Sakti, Institut Teknologi Bandung. Efisiensi biaya energi dan bahan bakar untuk proses pengeringan bahan serat

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Fisik			Keterangan
			Target	Satuan	Realisasi	
						alam (sebelumnya Rp. 400rb menjadi Rp. 80rb)
2.	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1. Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	1	Perusahaan	1	Kegiatan fasilitasi industri 4.0 berupa pelatihan sistem Adaptive Monitoring System berikut pelatihan produksi AiMS Ambien kepada PT. Autentik Karya Analitika.
		2. Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	5	Perusahaan	6	Kegiatan fasilitasi standardisasi industri berupa pendampingan, konsultasi, dan bimbingan penerapan standardisasi industri terkait: I. Standar Mutu a) Laboratorium Uji BP Batam - Pelatihan dan Pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2017 II. Standar Berkelanjutan a) PT. Desa Wisata Indonesia - Kerjasama Penyusunan Dokumen Persetujuan Teknis b) PT. Citra Warna Abadi - Kerjasama Penyusunan Dokumen Persetujuan Teknis. c) PT Ramai Santoso Sejahtera - Kerjasama konsultasi penyusunan dokumen lingkungan d) PT. Anugerah Pupuk Makmur - Pelatihan penyusunan dokumen industri hijau. e) PT Anugerah Pupuk Lestari - Pelatihan penyusunan dokumen industri hijau

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Fisik			Keterangan
			Target	Satuan	Realisasi	
3.	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	10	Persen	51,1	Produktivitas/efisiensi rata-rata perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi DAPATI tahun 2023 sebesar 51,1 Persen. 1] Konsultasi Optimalisasi Proses Produksi Garam Konsumsi Beryodium dan Garam Aneka Industri - UD Cap Battery Pengukuran performansi berupa peningkatan kualitas produk garam berdasar tingkat derajat keputihan sebesar 22,2 Persen (dr 45 ke 55 derajat keputihan) 2] Jasa Konsultasi Optimalisasi Proses Sistem Pengeringan Terkontrol - PT. Retota Sakti Pengukuran performansi berupa efisiensi biaya energi dan bahan bakar untuk proses pengeringan bahan serat alam (sebelumnya Rp. 400rb menjadi Rp. 80rb)
		2. Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	3	Persen	9,96	Peningkatan realisasi penerimaan PNPB basis yoy. • 2022 (sd 31 Des 2022): Rp.14.809.403.248,- • 2023 (sd 31 Des 2023): Rp. 16.283.712.001,-
		3. Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	2	Persen	2,34	Peningkatan realisasi hasil layanan jasa industri basis yoy. • 2022 (sd 31 Des 2022): 7.808 layanan jasa industri • 2023 (sd 31 Des 2023): 7.991 layanan jasa industri Realisasi layanan jasa industri tahun 2023:a. JPT Pengujian: 7.131 Laporan Hasil Ujib. JPT Kalibrasi: 359 Laporan Hasil Kalibrasic. JPT Pendampingan dan Bimbingan Teknis: 223 Orang Yang Dilatihd. JPT Sertifikasi: 229 Sertifikat/Hasil Survelanse. JPT Inspeksi

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Fisik			Keterangan
			Target	Satuan	Realisasi	
						Teknis dan Verifikasi Industri: 1 Orderf. JPT Konsultansi dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri: 5 orderg. JPT Penyelenggara Uji Profisiensi: 43 Order
		4. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	62	Persen	94,49	Berdasarkan perhitungan data pagu anggaran dan realisasi 2023 berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111 dengan mengacu pada data Monitoring Pagu dan Realisasi PDN menu e-Monitoring APBN pada sistem Intranew diperoleh data perhitungan % Realisasi PDN dan TKDN sebesar 94,49 Persen. Pagu anggaran terpilih : Rp. 1,118,865,000 ,- Realisasi PDN : Rp. 1,053,430,877 ,- Realisasi TKDN : Rp. 3,793,586 ,- Realisasi Impor : Rp. 57,345,190 ,-
4.	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92,5	Persen	100	Berdasarkan surat Inspektur Jenderal Kemenperin Nomor R/162/IJ-IND/PW/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 seluruh temuan atas hasil audit kinerja Itjen TA 2022 pada satker BBSPJPPI seluruhnya telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai
5.	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,63	Indeks	3,66	Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat atas jasa layanan BBSPJPPI dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017. Berdasarkan perhitungan indeks IKM untuk kuesioner kepuasan

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja		Fisik			Keterangan
				Target	Satuan	Realisasi	
							pelanggan yang masuk sd Desember 2023 sejumlah 280 kuesioner.
6.	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	1.	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	78	Indeks	81,7	Nilai indeks profesional ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019. Hasil penilaian indeks profesionalitas ASN satker BBSPJPPI tahun 2023 berdasarkan perhitungan Tim Kelompok Kerja Kepegawaian BBSPJPPI
7.	Penguatan Layanan Publik	1.	Nilai minimal indeks layanan publik	4,35	Indeks	4,84	Perhitungan nilai indeks layanan publik mengikuti Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penilaian indeks layanan publik satker BBSPJPPI tahun 2023 berdasarkan hasil self asesmen Tim Kelompok Kerja Kerjasama BBSPJPPI.
8.	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1.	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	77,0	Nilai	77,10	Evaluasi atas implementasi SAKIP 2022 pada satker BBSPJPPI sesuai Laporan Hasil Evaluasi Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 23/IJ-IND.4/LHE/IV/2023 tanggal 14 April 2023, satker BBSPJPPI memperoleh nilai sebesar 77,10 atau kategori BB (sangat baik)

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja		Fisik			Keterangan
				Target	Satuan	Realisasi	
		2.	Nilai minimal laporan keuangan	92,0	Nilai	98,00	Penilaian Laporan Keuangan TA 2022 Tingkat Satker di Lingkungan Kemenperin oleh Biro Keuangan Kemenperin berdasarkan surat Kepala Biro Keuangan Nomor B/1139/SJ-IND.3/KU/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 perihal Penyampaian Hasil Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Satker dan Unit Eselon I Tahun 2022

## B. Arah Pembangunan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, dilakukan upaya penguatan struktur perekonomian dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 telah ditetapkan penahapan capaian pembangunan Industri ke dalam tiga periode yaitu:

- i. Tahap I (2015-2019), diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.
- ii. Tahap II (2020–2024), diarahkan pada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas, serta

- iii. Tahap III (2025–2035) adalah visi Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Sejalan dengan fokus Kebijakan Industri Nasional serta dalam menghadapi era industri 4.0, Kementerian Perindustrian juga telah meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030 diantaranya melalui peningkatan porsi net ekspor menjadi 10% dari PDB dan dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya.

Guna mewujudkan fokus pengembangan industri periode tahun 2025-2029, Kementerian Perindustrian telah menyusun serangkaian program sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Industri Nasional dan RPJMN. Sesuai dengan kebijakan Redesign Sistem Perencanaan dan Penganggaran, program yang akan dijalankan oleh Kementerian Perindustrian diantaranya:

- 1) Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian;
- 2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri;
- 3) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) yang merupakan transformasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standarisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri. Dengan memperhatikan tugas dan fungsi BSKJI yang baru serta keberlanjutan dari rencana strategis yang telah disusun sebelumnya, BSKJI mendukung fokus industrialisasi yang akan terdiri dari:

- 1) Pengembangan dan Penerapan Standardisasi Industri;
- 2) Pengawasan Standardisasi Industri;
- 3) Pengembangan Industri Hijau;
- 4) Optimalisasi Pemanfaatan teknologi industri (termasuk teknologi industri 4.0) dan Kebijakan Jasa Industri;
- 5) Layanan Standardisasi dan Jasa Industri pada sebelas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar dan tiga belas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri;
- 6) Layanan Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika.

Guna mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia sebagai upaya memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional, Unit Pelaksana Teknis

(UPT) di lingkungan BSKJI yang tersebar di berbagai daerah berfungsi untuk memberikan layanan jasa teknis dan pengembangan industri kepada masyarakat industri.

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) yang dibentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI sesuai usulan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Perindustrian yang telah disetujui oleh KemenPAN RB akan memiliki tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri. Pada periode 2025-2029, BBSPJPPI akan mendukung pelaksanaan program yang telah ditetapkan Kementerian Perindustrian dan BSKJI sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari prioritas nasional, sasaran strategis, indikator dan target pada RPJMN, Kebijakan Industri Nasional, dimana BBSPJPPI akan berkontribusi pada:

- a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri.  
Diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri. BBSPJPPI berbekal kompetensi inti serta dukungan sarana prasarana yang dimiliki memberikan jasa layanan teknis dalam rangka mendukung penerapan kebijakan Kementerian Perindustrian khususnya dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau serta fasilitasi dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing industri diantaranya melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri.
- b. Program Dukungan Manajemen.  
BBSPJPPI menyelenggarakan layanan dukungan pengelolaan manajemen kesekretariatan untuk lingkup internal BBSPJPPI guna mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan oleh organisasi.

Menyesuaikan arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan oleh Kemenperin dan BSKJI sebagaimana dijelaskan di atas, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) dalam menentukan langkah yang akan ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan, visi dan misi organisasi, telah menetapkan arah kebijakan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi pelaksanaan kegiatan BBSPJPPI yang juga sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBSPJPPI diantaranya:

- i. Pelaksanaan Dukungan Terhadap Fungsi Unit Pusat di bawah BSKJI  
Seiring dengan perubahan susunan organisasi dan tata kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) menjadi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian, maka kedepannya BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis Balai Besar di bawah BSKJI akan mendukung fungsi keempat Pusat yang berada dalam SOTK BSKJI yakni Pusat Perumusan, Penerapan, dan

Pemberlakuan Standardisasi Industri (P4SI); Pusat Pengawasan Standardisasi Industri (P2SI); (c) Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, dan Kebijakan Jasa Industri (POPTIKJI); dan (e) Pusat Industri Hijau (PIH).

Adapun langkah strategis dan operasional yang diambil BBSPJPPI dalam mendukung fungsi keempat unit Pusat di bawah BSKJI diantaranya melalui:

- 1) Koordinasi dengan Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri BSKJI terkait pengembangan dan pengawasan standarisasi industri khususnya menyangkut:
    - a. Pengembangan standardisasi industri berupa perumusan RSNI, kaji ulang SNI bidang industri, kajian efektivitas penerapan SNI bidang industri yang diberlakukan wajib.
    - b. Penyusunan regulasi teknis standardisasi industri termasuk regulasi teknis skema penerapan dan pemberlakuan standardisasi industri.
- BBSPJPPI yang memiliki Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk melalui Peraturan Menteri Perindustrian untuk melakukan kegiatan penilaian kesesuaian dalam rangka pemberlakuan dan pengawasan SNI Wajib turut berperan aktif dalam proses penyusunan, evaluasi, pengkajian, peninjauan penerapan SNI produk diantaranya sebagai anggota Komite Teknis maupun sebagai Tim Konseptor pada kegiatan penyusunan RSNI dan kaji ulang SNI.
- 2) Koordinasi dengan Pusat Pengawasan Standarisasi Industri BSKJI terkait:
    - a. Pelaksanaan pengawasan terkait penerapan pemberlakuan standardisasi industri serta pengawasan pre-market dan post-market produk standardisasi industri khususnya untuk produk-produk yang proses penerbitan sertifikasi SPPT SNInya diterbitkan oleh LS Pro BBSPJPPI.
    - b. Penyiapan dan pelatihan personil yang memenuhi kompetensi Petugas Pengawas Standar Industri (PPSI) untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar industri.
  - 3) Koordinasi dengan Pusat Industri Hijau BSKJI terkait pengembangan Industri Hijau khususnya mengenai:
    - a. Evaluasi kebutuhan, pengkajian, peninjauan dan pengembangan standar industri hijau serta operasionalisasi Lembaga Sertifikasi Industri Hijau BBSPJPPI.
    - b. Penguatan kapasitas Lembaga Sertifikasi Industri Hijau BBSPJPPI melalui penambahan jumlah personil dan kompetensi auditor industri hijau BBSPJPPI.
    - c. Peningkatan kemampuan layanan standarisasi untuk industri hijau LSIH BBSPJPPI melalui pengajuan perluasan ruang lingkup layanan sertifikasi industri hijau.

4) Koordinasi dengan Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, dan Kebijakan Jasa Industri terkait pengembangan jasa dan optimasi pemanfaatan teknologi industri khususnya mengenai:

- a. Pemanfaatan teknologi oleh industri untuk mendukung peningkatan produktivitas/efisiensi sektor industri khususnya melalui pelaksanaan jasa konsultasi DAPATI (Dana Kemitraan Pemanfaatan Teknologi Industri) dengan mengimplementasi hasil inovasi teknologi yang dimiliki BBSPJPPI.
- b. Penyiapan infrastruktur penunjang pelaksanaan audit teknologi, diantaranya peningkatan jumlah auditor teknologi melalui pengiriman personil pada pelatihan auditor teknologi serta pada pelaksanaan proses assesment dan simulasi audit teknologi industri.
- c. Mendorong rintisan pemanfaatan inovasi teknologi dalam mendukung pembentukan ekosistem industri 4.0.

Sejalan dengan kebijakan Kementerian Perindustrian Making Indonesia 4.0, BBSPJPPI telah menginisiasi dengan mengembangkan inovasi teknologi terkait Smart Technology Monitoring System - Pemantauan Kualitas Lingkungan melalui Penerapan Internet of Things (IoT). Berbasis pada hasil kegiatan yang telah dijalankan tersebut, kedepannya BBSPJPPI bermaksud untuk melanjutkan program pengembangan IoT untuk sistem pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan terkait proses replikasi, perbaikan design dan engineering serta menginisiasi proses komersialisasi produk hasil inovasi teknologi tersebut.

ii. Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Infrastruktur Penerapan Standardisasi Industri dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri

Secara internal organisasi BBSPJPPI, arah kebijakan tersebut akan dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi pelaksanaan kegiatan. Adapun langkah strategis yang dilakukan akan difokuskan pada:

- a. Penguatan Tata Kelola Manajemen Organisasi
- b. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan
- c. Penyediaan dan penguatan kapasitas SDM melalui penerapan sistem pola karier dan meningkatkan kompetensi SDM BBSPJPPI
- d. Peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan teknis

Secara ringkas sasaran peningkatan kapasitas dan penguatan infrastruktur penerapan standardisasi industri dan pelayanan jasa pencegahan pencemaran industri di atas dapat ditampilkan sebagaimana tabel berikut:

No.	Aktivitas	Sasaran
1.	Penguatan Tata Kelola Manajemen Organisasi	a. Penerapan dan terpeliharanya akreditasi sistem manajemen mutu

No.	Aktivitas	Sasaran
		<p>balai dan LPK BBSPJPI</p> <p>b. Peningkatan akuntabilitas kinerja balai sebagai perwujudan penerapan Reformasi Birokrasi</p> <p>c. Peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi</p>
2.	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan	<p>a. Bertambah dan terakreditasinya ruang lingkup LPK BBSPJPI (laboratorium pengujian, kalibrasi dan lembaga sertifikasi)</p> <p>b. Perolehan persetujuan akreditasi/lisensi untuk pengajuan pembentukan LPK BBSPJPI yang mendukung standardisasi industri (Lembaga Pemeriksa Halal, Lembaga Validasi dan/atau Verifikasi Gas Rumah Kaca, Lembaga Sertifikasi Profesi, Lembaga Verifikasi TKDN, Lembaga Penyelenggara Uji Profisiensi)</p> <p>c. Komersialisasi produk inovasi teknologi BBSPJPI dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan teknologi industri</p>
3.	Penyediaan dan penguatan kapasitas SDM	Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi SDM teknis dan non teknis BBSPJPI yang sejalan dengan upaya penguatan dan pengembangan kelembagaan LPK serta pengembangan organisasi
4.	Peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan teknis	<p>a. Peningkatan kemampuan pemenuhan atas permintaan sektor industri terkait standardisasi dan layanan jasa industri</p> <p>b. Peningkatan kuantitas penerimaan</p>

No.	Aktivitas	Sasaran
		dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari aktivitas layanan jasa ke industri c. Peningkatan kepuasan pengguna jasa layanan BBSPJPI

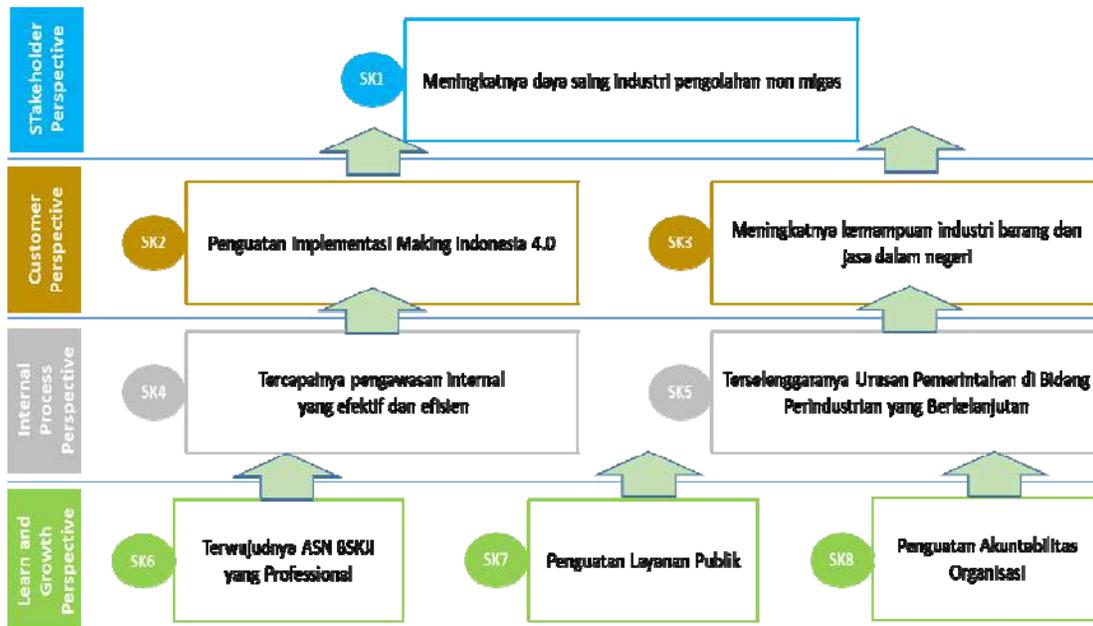
### BAB III RENCANA KINERJA

#### A. Sasaran

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi pertumbuhan industri, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah menyusun upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Indikator Kinerja dengan dengan Perspektif Pemangku kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Pembelajaran Organisasi.

BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI untuk mendukung pencapaian sasaran strategis BSKJI telah menetapkan sasaran strategi (sasaran kegiatan) yang mengacu pada sasaran strategi BSKJI diantaranya:

- Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas
- Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0
- Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri
- Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
- Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan
- Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional
- Penguatan Layanan Publik
- Penguatan Akuntabilitas Organisasi



Gambar 3.1 Peta Strategis BBSPJPPI

Guna mendukung pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan, pada tahun 2025 berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, BBSPJPPI berkontribusi dalam mendukung Program Kementerian Perindustrian dan BSKJI pada :

1. Program Nilai Tambah dan daya Saing Industri

Melalui pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri, BBSPJPPI menargetkan akan memberikan layanan jasa teknis kepada 788 pelanggan industri dengan lingkup layanan jasa teknis yang diberikan mencakup layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, bimbingan dan pendampingan teknis, inspeksi teknis dan verifikasi industri serta optimalisasi pemanfaatan teknologi industri.

Selain melakukan upaya pemeliharaan akreditasi atas LPK BBSPJPPI, pada tahun 2025 juga akan dilakukan pengembangan layanan diantaranya layanan uji profisiensi, audit/uji RATA serta inisiasi pembentukan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri) dan Produsen Bahan Acuan. Pengembangan layanan tersebut, sebagai salah satu bentuk upaya BBSPJPPI dalam menjalankan amanat organisasi yang ditetapkan dalam Permenperin Nomor 1 Tahun 2022 tentang Ortaker UPT di Lingkungan BSKJI. Sebagai satker yang ditetapkan sebagai instansi yang menerapkan pola keuangan BLU, upaya pengembangan layanan juga merupakan bentuk inovasi layanan dalam mendukung peningkatan penerimaan PNBPN dari pemberian jasa layanan.

Untuk mendukung operasional layanan pengujian, pada 2025 BBSPJPPI berencana melakukan pengadaan peralatan uji dan proses sebanyak 17 (tujuh belas) unit yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan peralatan dalam menunjang pengembangan ruang lingkup parameter pengujian khususnya menunjang pelaksanaan pengujian produk yang SNI nya diwajibkan. Hal ini tentunya sejalan dengan kebijakan Pemerintah terkait penerapan standardisasi untuk mendukung kebijakan substitusi impor. Disamping itu pengadaan peralatan uji juga ditujukan untuk mendukung upaya perluasan ruang lingkup dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan pengujian dari pihak industri terkait penerapan kebijakan pemantauan lingkungan industri sebagaimana diatur dalam PP Nomor 22 tahun 2021 (uji udara ambien, air laut, air sungai, Limbah B3). Disamping itu, pengadaan peralatan uji tahun 2025, juga difokuskan untuk mendukung pengembangan layanan salah satunya melalui pengadaan peralatan untuk mendukung audit/uji RATA.

Sebagai upaya mendukung peningkatan jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan, BBSPJPPI melakukan promosi dan publikasi baik dilakukan melalui media cetak, elektronik maupun diwujudkan melalui partisipasi pada kegiatan pameran, pelaksanaan forum interaktif, serta pengelolaan media sosial balai.

Disamping itu, pengelolaan dan penghargaan kepada pelanggan loyal BBSPJPPI dilakukan melalui pelaksanaan Temu Pelanggan yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya yang dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik atas pelaksanaan dan

kinerja jasa layanan BBSPJPPI sebagai dasar bahan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan BBSPJPPI kedepannya.

2. Program Dukungan Manajemen

Melalui pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri BBSPJPPI menyelenggarakan layanan dukungan pengelolaan manajemen kesekretariatan untuk lingkup internal diantaranya BBSPJPPI secara berkelanjutan akan mengembangkan Sistem Informasi Digital Terintegrasi (SINDIi) untuk mendukung penerapan e-Governance dan e-Services sekaligus memenuhi target kinerja modernisasi BLU yang ditetapkan oleh Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Selain melakukan pembinaan kepegawaian, dalam rangka mendorong peningkatan indeks profesionalitas ASN BBSPJPPI akan dilakukan pengembangan kompetensi SDM internal BBSPJPPI melalui pelaksanaan pelatihan baik berupa Diklat Teknis ASN, Diklat Pengembangan Jabatan Fungsional ataupun Diklat dan Pelatihan Teknis yang menunjang pengembangan layanan. Ditargetkan pada 2025, sebanyak 50 personil BBSPJPPI dapat ditingkatkan kompetensinya.

Dalam menunjang pelaksanaan operasional perkantoran, pada 2025 direncanakan untuk proses pengadaan berbagai fasilitas sarana prasarana perkantoran. Pengadaan inventaris perkantoran diperlukan baik berupa pengadaan inventaris perkantoran baru yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan operasional perkantoran maupun yang berfungsi untuk menggantikan fungsi inventaris perkantoran sebelumnya yang kondisinya telah rusak. Untuk pengadaan sarana perkantoran direncanakan untuk pengadaan 75 unit perangkat pengolah data dan komunikasi, 62 unit peralatan inventaris perkantoran, serta 2 unit pengadaan kendaraan bermotor (1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan untuk menunjang mobilitas pimpinan satker serta 1 (satu) unit kendaraan operasional roda dua). Adapun untuk sisi prasarana penunjang perkantoran, pada 2025 turut direncanakan untuk dilakukan peningkatan kapasitas bangunan Laboratorium Instrumen dan Laboratorium Optimalisasi Teknologi guna mendukung modernisasi laboratorium dalam menunjang peningkatan kualitas layanan sekaligus pemenuhan standar fungsi laboratorium sebagaimana dipersyaratkan dalam ISO 17025 terkait persyaratan umum kompetensi laboratorium.

Sementara itu untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, BBSPJPPI senantiasa berkoordinasi dengan BSKJI selaku unit Pembina Teknis terkait dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran, monitoring evaluasi kinerja serta penyusunan pelaporan BMN dan laporan keuangan. Khusus terkait pelaporan keuangan, BBSPJPPI selaku entitas bisnis dengan ditetapkannya BBSPJPPI sebagai satker BLU, maka atas Laporan Keuangan yang telah disusun tersebut wajib untuk dilakukan audit oleh auditor eksternal independen dalam hal ini dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

## B. Indikator Kinerja

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja untuk masing-masing sasaran strategis sebagai berikut:

### i. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Perspective*)

Sasaran strategis pada perspektif stakeholders merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJPPI untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan, yakni:

1. **Sasaran Strategis ke-1 (SK1):** Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

1) Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi.

### ii. Perspektif Pelanggan (*Customers Perspective*)

Sasaran strategis pada perspektif customers merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJPPI untuk memenuhi harapan para pelanggan, yakni:

1. **Sasaran Strategis ke-2 (SK2):** Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

1) Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0.

2) Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri

2. **Sasaran Strategis ke-3 (SK3):** Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

1) Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi.

2) Meningkatnya PNBP layanan jasa industri.

3) Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan

4) Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa

### iii. Perspektif Proses Bisnis Internal (*Internal Process Perspective*)

Sasaran strategis pada perspektif internal process merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJPPI untuk memenuhi harapan pada penyelenggaraan proses internal di BBSPJPPI yang menjamin tercapainya sasaran strategis pada perspektif stakeholders, yakni:

1. **Sasaran Strategis ke-4 (SK4):** Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

1) Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker.

2. **Sasaran Strategis ke-5 (SK5):** Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
  - 1) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri.
- iv. **Perspektif Pembelajaran Organisasi (*Learning and Growth Perspective*)**  
 Sasaran strategis pada perspektif pembelajaran organisasi merupakan sasaran yang ditetapkan BBSPJPPI untuk memenuhi proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi BBSPJPPI. Capaian pada perspektif ini merupakan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome BBSPJPPI. Sasaran strategis yang akan dicapai yakni:
  1. **Sasaran Strategis ke-6 (SK6):** Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
    - 1) Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN.
  2. **Sasaran Strategis ke-7 (SK7):** Penguatan Layanan Publik, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
    - 1) Nilai minimal indeks layanan publik.
  3. **Sasaran Strategis ke-8 (SK8):** Penguatan Akuntabilitas Organisasi, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
    - 1) Nilai minimal akuntabilitas kinerja.
    - 2) Nilai minimal laporan keuangan.

### C. Indikator Kinerja Utama

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2025, BBSPJPPI akan melaksanakan program kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Perindustrian dan BSKJI (sebagaimana yang dijabarkan pada Bab II) serta mendukung pencapaian visi misi, tujuan dan sasaran strategis organisasi BBSPJPPI.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kinerja capaian pelaksanaan program kegiatan maka telah ditetapkan indikator kinerja dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) BBSPJPPI adalah indikator kinerja sasaran strategis pada perspektif pemangku kepentingan (*Stakeholders Perspective*) dan perspektif pelanggan (*Customers Perspective*) berdasar Peta Strategi Renstra BBSPJPPI. Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan tersebut merupakan kondisi hasil/kinerja yang akan dicapai secara nyata (outcome) dan merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung terwujudnya kinerja. Indikator Kinerja Utama BBSPJPPI adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Target 2025
<b><i>Stakeholders Perspective</i></b>		
<b>SK1. Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas</b>		
1.	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil	5

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Target
		2025
	kegiatan kolaborasi (Persen)	
<b>Customers Perspective</b>		
<b>SK2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0</b>		
1.	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0 (perusahaan)	1
2.	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri (perusahaan)	6
<b>SK3. Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri</b>		
1.	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi (Persen)	10
2.	Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri (Persen)	5
3.	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan (Persen)	3
4.	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa (Persen)	67

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kinerja Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri disusun sebagai bentuk komitmen BBSPJPPI dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi Pemerintah. Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja, dimulai dari penyusunan Renstra, Renja, Perkin dan diakhiri dengan pelaporan kinerja.

Rencana kinerja ini merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari Renstra yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kinerja memberikan gambaran lebih detail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya atas pelaksanaan kegiatan pertahunnya. Dokumen ini memuat kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat diukur capaian kerjanya.

Rencana Kinerja yang disusun mengacu pada visi misi BBSPJPPI kedepan yang disesuaikan dengan arah dan kebijakan pengembangan industri yang dijalankan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI). Pada tahun 2025, BBSPJPPI dalam penyusunan kegiatan telah menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis dan 13 (tiga belas) indikator kinerja yang mendukung capaian tujuan dan sasaran strategis BSKJI serta selaras dengan tahapan pencapaian Rencana Strategis BBSPJPPI.

**Lampiran I:**

Formulir Rencana Kinerja

**RENCANA KINERJA**

Kementerian Perindustrian

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

Unit Pelaksana Teknis : Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan  
Pencemaran Industri

Tahun : 2025

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Non Migas	1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	5	Persen
2.	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1. Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	1	Perusahaan
		2. Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	6	Perusahaan
3.	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	10	Persen
		2. Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri	5	Persen
		3. Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	3	Persen
		4. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	67	Persen
4.	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	93	Persen
5.	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,67	Indeks
6.	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	1. Rata-rata indeks profesionalitas ASN	82	Indeks
7.	Penguatan Layanan Publik	1. Nilai minimal indeks layanan publik	4,45	Indeks

8.	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1.	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	80,5	Nilai
		2.	Nilai minimal laporan keuangan	94	Nilai

Total Kebutuhan Anggaran Tahun 2025 : Rp. 45.934.097.000,-

(Empat Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan PuluhTujuh Ribu Rupiah)

Semarang, 30 Januari 2024

Kepala  


Dr. Sidik Herman

NIP. 19760909 200502 1 001



**SATUAN 3B**  
**BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/RO	TARGET	SATUAN	KOMPONEN KEGIATAN	LATAR BELAKANG	TUJUAN	RUANG LINGKUP	KEBUTUHAN ANGGARAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
019.EC	PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI							20.095.928.000
6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri							20.095.928.000
BAD	Pelayanan Publik Kepada Industri							9.535.006.000
002	Jasa pelayanan teknis pengujian Pencegahan Pencemaran Industri	480	Industri	[1] Jasa Pelayanan Teknis Pengujian: a. <i>Koordinasi Peningkatan Layanan dan Operasional Laboratorium Pengujian</i> b. <i>Layanan Pengujian Pengendalian Pencemaran</i> c. <i>Layanan Pengujian Aneka Komoditi</i>  [2] Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Pengujian	BBSPJPPi selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI sesuai Permenperin No. 1 Tahun 2022, mempunyai tugas antara lain melaksanakan standarisasi industri dan pelayanan jasa industri diantaranya dengan menjalankan fungsi pelaksanaan pengujian. BBSPJPPi sebagai instansi Pemerintah yang telah menerapkan pengelolaan keuangan BLU sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 59 Tahun 2010 memberikan layanan teknis pengujian kepada masyarakat khususnya industri dalam rangka pemantauan parameter kualitas lingkungan maupun pengujian bahan dan barang dalam rangka penerapan standarisasi dan pengawasan mutu produk. Dalam pelaksanaan operasional jasa pengujian, BBSPJPPi memiliki laboratorium pengujian terakreditasi KAN (LP-084-IDN) dan registrasi oleh KLHK yang mampu melakukan pengujian parameter lingkungan (cair, udara, padat dan B3, biologi lingkungan) serta laboratorium aneka komoditi terakreditasi KAN (LP-084-IDN) yang mampu melayani pengujian mutu produk yang terkait dengan SNI wajib maupun sukarela (AMDK, furniture, tepung terigu, garam, minyak goreng sawit, kopi instan, pupuk, biskuit, kimia). Laboratorium pengujian BBSPJPPi juga telah memenuhi dan secara konsisten menerapkan standar persyaratan kompetensi untuk laboratorium sebagaimana dipersyaratkan dalam ISO 17025. Berkaitan dengan hal ini setiap tahunnya dilakukan pemeliharaan akreditasi lembaga pengujian baik melalui proses reakreditasi maupun melalui pelaksanaan Surveilans yang diselenggarakan KAN. Sementara itu, dalam mendukung operasional laboratorium pengujian perlu dilakukan upaya penyediaan sarana prasarana pendukung (bahan kimia, sparepart alat uji, perlengkapan sampling) sekaligus melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari proses pengujian. Pada tahun 2025, juga akan dilakukan pengembangan layanan dimana BBSPJPPi menyelenggarakan jasa layanan uji profisiensi untuk lingkup pengujian parameter lingkungan. Melalui layanan ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi laboratorium uji yang ada untuk dapat melaksanakan uji profisiensi antar laboratorium sehingga dapat dikontrol kinerja masing-masing Laboratorium secara eksternal sesuai dengan ketentuan standar sistem mutu ISO/IEC 17025	1) Operasional laboratorium pengujian dalam memenuhi kebutuhan sektor industri terkait: a. pengujian parameter lingkungan dalam rangka pemenuhan ketaatan pemantauan lingkungan di sektor industri b. pengujian mutu produk dalam rangka pemenuhan standar mutu produk (SNI/Produk). c. uji profisiensi antar laboratorium uji dalam rangka pemantauan unjuk kerja laboratorium pengujian	1) Penerapan standar ISO 17025 dan pemeliharaan status akreditasi lembaga laboratorium pengujian 2) Pelaksanaan pengambilan sampel (untuk sampel yang tidak diantar), pengujian dan penerbitan sertifikat uji 3) Pengujian dan assesmen perluasan ruang lingkup parameter pengujian 4) Penyediaan dukungan dan penggantian sarana prasarana operasional layanan pengujian 5) Pengelolaan dan pengangkutan limbah B3 hasil pengujian 6) Pelaksanaan Rapat Komite Ketidakberpihakan 7) Koordinasi dengan instansi teknis dalam pelaksanaan evaluasi, pengkajian, peninjauan penerapan pengujian sesuai standar SNI 8) Penyelenggaraan uji profisiensi lingkup parameter lingkungan	7.498.082.000
022	Jasa pelayanan teknis kalibrasi Pencegahan Pencemaran Industri	30	Industri	[1] Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi: a. <i>Koordinasi Peningkatan Layanan dan Operasional Laboratorium Kalibrasi</i> b. <i>Layanan Kalibrasi Insitu dan Uji RATA/CGA</i> [2] Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kalibrasi	BBSPJPPi selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI sesuai Permenperin No. 1 Tahun 2022, mempunyai tugas antara lain melaksanakan standarisasi industri dan pelayanan jasa industri diantaranya dengan menjalankan fungsi pelaksanaan pengujian kalibrasi. BBSPJPPi sebagai instansi Pemerintah yang telah menerapkan pengelolaan keuangan BLU sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 59 Tahun 2010 memberikan layanan teknis kalibrasi untuk peralatan mesin dan laboratorium dengan lingkup kalibrasi suhu dan kelembaban, massa, volumetric measures dan glassware serta kalibrasi instrumen analitik. Laboratorium kalibrasi BBSPJPPi telah terakreditasi KAN sesuai SNI ISO 17025 (LK 075-IDN). Berkaitan dengan hal ini setiap tahunnya dilakukan pemeliharaan akreditasi lembaga laboratorium kalibrasi baik melalui proses reakreditasi maupun melalui pelaksanaan Surveilans yang diselenggarakan KAN. Pengembangan kapasitas kemampuan layanan kalibrasi dilakukan melalui upaya perluasan ruang lingkup yang turut diajukan bersamaan dengan proses assesmen KAN. Berkel dukungan SDM, prasarana serta kompetensi di bidang pengukuran dan pemantauan kualitas lingkungan udara, sekaligus menjawab kebutuhan sektor industri atas penerapan kebijakan terkait pemantauan kualitas lingkungan BBSPJPPi kedepannya bermaksud untuk melakukan perluasan ruang lingkup pemberian layanan berupa penyediaan jasa layanan uji/audit RATA. Uji/audit RATA sendiri merupakan upaya penjaminan mutu hasil pengukuran emisi menggunakan sistem pemantauan emisi terus menerus (CEMS) sebagaimana 10 (sepuluh) sektor industri saat ini telah diwajibkan untuk melakukan pemantauan Emisi menggunakan Sistem Pemantauan Emisi Secara Terus Menerus (Continuous Emission Monitoring System, CEMS) sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2021.	Operasional laboratorium kalibrasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan industri terkait jaminan kepastian pengukuran untuk peralatan uji/ukur dan penjaminan mutu hasil pengukuran emisi menggunakan sistem pemantauan emisi terus menerus (CEMS)	1) Penerapan standar ISO 17025 dan pemeliharaan status akreditasi lembaga laboratorium kalibrasi 2) Pengujian dan assesmen perluasan ruang lingkup kalibrasi 3) Pelaksanaan pengujian artefak kalibrasi ( <i>insitu dan eksitu</i> ) dan penerbitan sertifikat kalibrasi 4) Pelaksanaan kalibrasi peralatan CEMS melalui audit RATA (Relative Accuracy Test Audit) 5) Pelaksanaan Rapat Komite Ketidakberpihakan	336.736.000
034	Jasa pelayanan teknis sertifikasi Pencegahan Pencemaran Industri	240	Industri	[1] Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi: a. <i>Layanan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu</i> b. <i>Layanan Sertifikasi Produk</i> c. <i>Layanan Sertifikasi Industri Hijau</i> d. <i>Layanan Sertifikasi Manajemen Lingkungan</i> e. <i>Jasa Pelayanan Pemeriksa Halal</i> f. <i>Analisis Penerapan dan Pengawasan Standardisasi Industri</i> [2] Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Lembaga Sertifikasi	BBSPJPPi selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI sesuai Permenperin No. 1 Tahun 2022, mempunyai tugas antara lain melaksanakan standarisasi industri dan pelayanan jasa industri diantaranya dengan menjalankan fungsi pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau. Hal ini juga sejalan dengan peran BBSPJPPi sebagai instansi Pemerintah yang telah menerapkan pengelolaan keuangan BLU sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 59 Tahun 2010 diantaranya dengan memberikan layanan teknis sertifikasi. Terkait pemberian layanan sertifikasi, BBSPJPPi mengelola dan mengembangkan: • Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu - BISQA (LSSM BISQA) yang dikelola sesuai dengan ISO 17021 dan telah di akreditasi oleh KAN (LSSM-007-IDN), sehingga dapat melayani masyarakat industri untuk memperoleh sertifikasi ISO 9001; • Lembaga Sertifikasi Produk - LSPro (LS Pro BBSPJPPi) yang dikelola sesuai dengan ISO 17065 dan telah diakreditasi oleh KAN (LSPR-016-IDN) sehingga dapat melayani masyarakat industri untuk memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI; • Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan - Brisema (LSSML BBSPJPPi - Brisema) yang dikelola sesuai dengan ISO 17021 dan telah terakreditasi oleh KAN (LSSML-024-IDN) sehingga direncanakan dapat melayani masyarakat industri untuk memperoleh sertifikasi lingkungan. • Lembaga Sertifikasi Industri Hijau BBSPJPPi. LSIH BBSPJPPi melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2021 tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau, ditunjuk sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan kegiatan sertifikasi industri hijau dan menerbitkan sertifikat industri hijau dalam rangka mendukung kebijakan pengembangan industri hijau. • Lembaga Sertifikasi Halal. Guna mendukung upaya jaminan produk halal, BBSPJPPi memiliki Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Pratama Gol I dengan ruang lingkup makanan dan minuman yang mampu melayani kebutuhan masyarakat terkait penerbitan sertifikasi halal Selain Lembaga Sertifikasi yang telah eksisiting, kedepannya dalam mendukung standarisasi kompetensi personil di bidang lingkungan, akan dilakukan pembentukan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Pencegahan Pencemaran Industri). BBSPJPPi sebagai lembaga pemberi layanan teknis perlu untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan dengan menerapkan sistem standar mutu yang telah ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi. Pemberian layanan sertifikasi dan penerapan standar mutu produk juga sejalan dengan upaya BBSPJPPi dalam mendukung kebijakan penerapan standarisasi produk. Kebijakan penerapan standar produk industri merupakan salah satu program prioritas Kementerian Perindustrian. Selain itu, kebijakan penerapan standar juga berperan di dalam meningkatkan mutu serta mendukung peningkatan daya saing industri dalam memasuki pasar global maupun di pasar dalam negeri dan terciptanya iklim usaha yang kondusif dan persaingan usaha yang sehat, serta terjaminnya perlindungan konsumen dalam segi keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan.	Operasional Lembaga Sertifikasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan industri terkait assesmen untuk pemenuhan dan penerapan standar sistem mutu untuk lingkup manajemen mutu, standar mutu produk, standar industri hijau dan manajemen mutu lingkungan, serta sertifikasi halal	1) Penerapan standar ISO 17021, ISO 17065 dan pemeliharaan status akreditasi lembaga sertifikasi 2) Pengujian dan assesmen perluasan ruang lingkup sertifikasi 3) Pelaksanaan audit (sertifikasi, surveilans resertifikasi) 4) Pelaksanaan Rapat Teknis pengambilan keputusan penerbitan sertifikat 5) Pelaksanaan Rapat Komite Ketidakberpihakan 6) Pengembangan lembaga sertifikasi (Lembaga Sertifikasi Profesi BBSPJPPi) 7) Koordinasi dengan instansi Teknis dalam pelaksanaan evaluasi, pengkajian, peninjauan penerapan SNI Produk	977.228.000

**SATUAN 3B**  
**BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/RO	TARGET	SATUAN	KOMPONEN KEGIATAN	LATAR BELAKANG	TUJUAN	RUANG LINGKUP	KEBUTUHAN ANGGARAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
055	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri Pencegahan Pencemaran Industri	5	Industri	[1] Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri	BBSPJPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI sesuai Permenperin No. 1 Tahun 2022, mempunyai tugas antara lain melaksanakan standardisasi industri dan pelayanan jasa industri diantaranya dengan menjalankan fungsi pelaksanaan pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi industri. Berkaitan dengan hal ini, BBSPJPI sebagai instansi Pemerintah yang telah menerapkan pengelolaan keuangan BLU sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 59 Tahun 2010 memberikan layanan teknis bimbingan dan pendampingan teknis industri sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi SDM industri khususnya di bidang pencegahan pencemaran industri. BBSPJPI dengan dukungan SDM yang berkompeten memberikan jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri meliputi pelatihan di bidang proses produksi, pengendalian pencemaran industri (teknologi proses, pelatihan operator IPAL, pengelolaan limbah B3, penerapan produksi bersih, pelatihan PPC), pelatihan sistem manajemen (sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, manajemen K3 laboratorium, penerapan sistem manajemen laboratorium, pelaksanaan audit internal) serta pelatihan pemahaman metode dan proses uji untuk kegiatan pengujian dan kalibrasi.	Meningkatkan kompetensi SDM industri di bidang pencegahan pencemaran industri yang mendukung pada pertumbuhan industri secara berkelanjutan	1) Penyusunan serta pembuatan materi dan modul pelatihan 2) Pelaksanaan bimbingan dan pendampingan teknis peningkatan kompetensi SDM industri dan penerbitan sertifikat pelatihan	217.110.000
056	Jasa pelayanan inspeksi teknis Pencegahan Pencemaran Industri	10	Industri	[1] Jasa Pelayanan Inspeksi Teknis dan Verifikasi Industri a. Layanan Verifikasi TKDN	BBSPJPI kedepannya akan melakukan pengembangan kapasitas layanan dalam lingkup jasa layanan inspeksi dan verifikasi teknis diantaranya layanan verifikasi TKDN. Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan tupoksi sebagaimana diamanatkan dalam Permenperin No. 1 Tahun 2022 sekaligus bentuk dukungan atas kebijakan Pemerintah dalam upaya pemberdayaan industri nasional melalui penerapan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam produk barang/jasa yang dihasilkan industri dalam negeri. BBSPJPI melalui Lembaga Verifikasi TKDN yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian akan memberikan layanan terkait verifikasi TKDN terkait kebijakan verifikasi industri sendiri saat ini telah terbit Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 4058 Tahun 2023 tentang Penunjukan Lembaga Verifikasi Independen Pelaksana Penghitungan dan Verifikasi Besaran Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Nilai Bobot Manfaat Perusahaan yang salah satunya menunjuk Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri untuk melakukan verifikasi TKDN	Pemberian layanan inspeksi/verifikasi teknis kepada industri untuk memverifikasi TKDN produk/jasa dalam negeri	1) Pelaksanaan inspeksi dan verifikasi dalam rangka penerbitan sertifikat TKDN	28.668.000
057	Layanan Konsultasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	8	Industri	[1] Layanan Konsultasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri a. Konsultasi Design IPAL dan Penyusunan Dokumen Pertek b. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri [2] Kolaborasi Pemanfaatan dan Penerapan Teknologi Industri	BBSPJPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI sesuai Permenperin No. 1 Tahun 2022, mempunyai tugas antara lain melaksanakan standardisasi industri dan pelayanan jasa industri diantaranya dengan menjalankan fungsi pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, pendampingan dan konsultasi di bidang optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, serta penerapan industri 4.0 utamanya di bidang pencegahan pencemaran industri. BBSPJPI selaku organisasi yang pernah menjalankan fungsi sebagai lembaga Litbang memiliki inovasi teknologi hasil pelaksanaan kegiatan Litbangnya dengan tingkat kesiap terapan tinggi (di atas 7) yang dapat dioptimalkan dan diimplementasikan dalam mendukung peningkatan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian sektor industri. Beberapa hasil inovasi tersebut diantaranya Anaerobic-Aerobic -Wetland Integrated Technology untuk pengolahan limbah organik cair, reaktor Hybrid Advanced Oxidation Process (HAOP) untuk pengolahan polutan berupa zat warna dengan prinsip advanced oxidation process dan Adaptive Monitoring System (AIMS) untuk pemantauan kualitas air limbah, limbah udara emisi dan ambient serta ruang kerja secara real time. Pengembangan AIMS merupakan perwujudan Smart Technology Monitoring System untuk pemantauan kualitas lingkungan melalui Penerapan Internet of Things (IoT) sebagai bentuk implementasi kebijakan Kementerian Perindustrian Making Indonesia 4.0. Berbasis pada hasil inovasi/teknologi industri yang dimiliki BBSPJPI yang telah diuji coba terapkan di industri tersebut, berikutnya BBSPJPI bermaksud untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya terkait proses replikasi, serta menginisiasi proses komersialisasi produk inovasi tersebut. Disamping itu, dengan diberlakukannya Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan pihak industri untuk mengelola limbah industrinya, terbuka peluang bagi BBSPJPI untuk memberikan konsultasi teknis terkait proses pengolahan dan penanganan limbah industri untuk mendukung pengembangan industri yang berkelanjutan sesuai prinsip penerapan industri hijau dengan memanfaatkan/mengoptimalkan teknologi yang dimiliki BBSPJPI.	Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri dalam mendukung peningkatan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian sektor industri	1) Replikasi/rancang bangun peralatan hasil inovasi 2) Komersialisasi produk inovasi untuk penerapan di industri 3) Konsultasi teknis penerapan teknologi penanganan pencemaran industri 4) Kolaborasi dalam rangka optimasi pemanfaatan teknologi industri	477.182.000
096	Jasa Pelayanan Teknis Uji Profisiensi Pencegahan Pencemaran Industri	15	Industri	[1] Jasa Pelayanan Teknis Uji Profisiensi [2] Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Penyelenggara Uji Profisiensi	Merujuk pada persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian sesuai standar ISO 17025, laboratorium pengujian harus memuat kinerja pengujian dengan membandingkan hasil uji yang dihasilkan dengan hasil uji laboratorium lain sebagai bentuk jaminan mutu eksternal. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengetahui unjuk kerja atau kinerja laboratorium pengujian adalah melalui pelaksanaan uji profisiensi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Ortaker UPT di Lingkungan BSKJI, BBSPJPI menyelenggarakan fungsi salah satunya penyelenggara uji profisiensi. Menjawab kebutuhan laboratorium pengujian lingkungan akan pelaksanaan uji profisiensi, BBSPJPI berencana untuk menyelenggarakan layanan uji profisiensi untuk pengujian parameter air limbah/matriks air limbah sesuai SNI ISO/IEC 17043:2023. Kegiatan uji profisiensi untuk pengujian parameter air limbah selanjutnya diharapkan dapat diikuti oleh laboratorium pengujian lingkungan di seluruh wilayah Indonesia sebagai salah satu cara untuk memantau unjuk kerja laboratorium pengujian dalam rangka menjamin keabsahan hasil pengujian. Melalui uji profisiensi, kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dijalankan khususnya oleh sektor industri akan berjalan efektif dan efisien karena telah didukung oleh data yang dihasilkan dari laboratorium pengujian lingkungan yang kompeten	Mengetahui kinerja laboratorium lingkungan di Indonesia dan menjadi jaminan ketertelusuran dalam melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan khususnya air limbah.	1) Perolehan dan pemeliharaan akreditasi lembaga Penyelenggara Uji Profisiensi 2) Penyediaan program pengolahan data (profftest) 3) Pelaksanaan Uji Profisiensi, meliputi tahapan: a) Pertemuan Teknis pelaksanaan uji profisiensi, b) Preparasi, uji homogenitas dan stabilitas sampel serta distribusi sampel uji profisiensi, c) Evaluasi dan pembuatan laporan uji profisiensi	255.668.000
CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan							10.003.710.000
013	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan Pencegahan Pencemaran Industri	17	Unit	Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/ workshop/layanan	BBSPJPI dalam menunjang operasional pelaksanaan tupoksi dan fungsi pelayanan ditunjang dengan keberadaan prasarana berupa laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi. Dalam rangka peningkatan pelayanan jasa pengujian kepada masyarakat, maka diperlukan sarana pendukung berupa ketersediaan peralatan pengujian dan peralatan proses yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan metode uji. Kondisi saat ini beberapa peralatan uji BBSPJPI telah berusia cukup tua dan kurang lengkap sehingga belum mendukung pelaksanaan pengujian sesuai metode uji. Hal ini menyebabkan apabila terjadi kendala kerusakan pada peralatan akan berpengaruh pada waktu penyelesaian pengujian sehingga dapat berdampak terhadap tingkat kepuasan pelanggan. Oleh karenanya, selain mengupayakan jadwal pemeliharaan peralatan secara berkala, BBSPJPI secara bertahap akan melakukan penambahan dan modernisasi peralatan. Keberadaan peralatan proses dan pengujian dengan kemampuan teknologi terkini tentunya akan mendukung kelancaran dan mendukung penyediaan data yang akurat pada saat proses pelaksanaan pengujian. Disamping itu, dengan adanya penambahan kelengkapan prasarana peralatan uji dan proses juga akan berdampak pada pengurangan ketergantungan terkait pelaksanaan pengujian yang harus dilakukan melalui mekanisme sub kontraktor. Pengadaan peralatan uji dan proses BBSPJPI difokuskan pada pemenuhan kebutuhan peralatan dalam menunjang pengembangan ruang lingkup parameter pengujian khususnya menunjang pelaksanaan pengujian produk yang SNInya diwajibkan. Hal ini tentunya sejalan dengan kebijakan Pemerintah terkait penerapan standardisasi untuk mendukung kebijakan substitusi impor. Disamping itu pengadaan peralatan uji juga ditujukan untuk mendukung upaya perluasan ruang lingkup dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan pengujian dari pihak industri terkait penerapan kebijakan pemantauan lingkungan industri sebagaimana diatur dalam PP Nomor 22 tahun 2021 (uji udara ambient, air laut, air sungai, Limbah B3). Pengadaan peralatan uji tahun 2025, juga difokuskan untuk mendukung pengembangan layanan salah satunya melalui pengadaan peralatan untuk mendukung audit/uji RATA.	Tersedianya peralatan proses dan uji sebagai upaya modernisasi dan kelengkapan ketersediaan peralatan dalam rangka mendukung pengembangan kapasitas dan peningkatan kualitas pelayanan pengujian	1) Identifikasi volume, jenis dan spesifikasi kebutuhan peralatan pengujian 2) Persiapan pengadaan (penyusunan RUP, dokumen pengadaan, jadwal pelelangan) 3) Proses pengadaan/pedelelangan mendukung pengembangan kapasitas dan peningkatan kualitas pelayanan pengujian 4) Pengadaan oleh Penyedia dan proses serah terima barang	10.003.710.000

**SATUAN 3B**  
**BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/RO	TARGET	SATUAN	KOMPONEN KEGIATAN	LATAR BELAKANG	TUJUAN	RUANG LINGKUP	KEBUTUHAN ANGGARAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi							557.212.000
013	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi/ Diseminasi Layanan Teknis Pencegahan Pencemaran Industri	150	Orang	[1] Sosialisasi Layanan Jasa Teknis [2] Publikasi Layanan Jasa Teknis	Salah satu fungsi BBSPJPI sebagaimana ditetapkan melalui Permenperin No. 1 Tahun 2022 diantaranya adalah pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri. Hal ini tentunya juga sejalan fungsi BBSPJPI selaku satker BLU yang bergerak di lingkup layanan jasa kepada masyarakat yang salah satu target kerjanya sebagaimana tertuang dalam kontrak kinerja BLU dengan Menteri Keuangan salah satunya dituntut untuk selalu dapat meningkatkan penerimaan PNPB yang dihasilkan dari pemberian jasa layanan kepada masyarakat khususnya industri. Peningkatan penerimaan PNPB tentunya dapat terealisasi tidak hanya terbatas pada upaya peningkatan kapasitas layanan yang dilakukan, namun juga menyangkut pada upaya untuk pengelolaan pelanggan eksisting dan upaya untuk memperoleh pelanggan/pasar baru. Tentunya hal tersebut tidak dapat dilepasakan pada upaya pelaksanaan promosi dan publikasi atas kapabilitas kemampuan layanan BBSPJPI. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempublikasikan kompetensi dan kemampuan BBSPJPI dalam pemberian layanan yang dibutuhkan oleh industri. Pelaksanaan promosi dan publikasi dilakukan baik melalui media cetak, elektronik maupun diwujudkan melalui partisipasi pada kegiatan pameran, pelaksanaan forum interaktif, serta pengelolaan media sosial balai. Disamping itu pengelolaan dan penghargaan kepada pelanggan loyal BBSPJPI dilakukan melalui pelaksanaan Temu Pelanggan yang dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik atas pelaksanaan dan kinerja jasa layanan BBSPJPI sebagai dasar bahan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan kedepannya.	1) Publikasi kapasitas dan kompetensi jasa layanan teknis BBSPJPI 2) Memperluas akses pasar jasa layanan teknis BBSPJPI untuk mendorong peningkatan penerimaan PNPB 3) Pemberian penghargaan dan apresiasi kepada pelanggan loyal BBSPJPI	1) Pelaksanaan Business Gathering/Temu Pelanggan BBSPJPI 2) Partisipasi pada pelaksanaan pameran 3) Pelaksanaan promosi di media cetak dan elektronik	557.212.000
019.WA	<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>							<b>25.582.501.000</b>
6042	<b>Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri</b>							<b>25.582.501.000</b>
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							21.430.266.000
994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	Gaji dan Tunjangan  Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Sebagaimana diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 1977 dan seluruh peraturan perubahannya, Pegawai Negeri Sipil menerima penghasilan berupa gaji untuk kesejahteraan pegawai. Selain gaji pokok, Pegawai Negeri Sipil juga menerima tunjangan yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam mendukung program Reformasi Birokrasi, kepada pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian diberikan tunjangan kinerja yang besarnya didasarkan pada kinerja pegawai sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian. Pencairan tunjangan kinerja pegawai didasarkan pada evaluasi atas capaian kinerja pegawai setiap bulannya.  Untuk mendukung kelancaran operasional kegiatan layanan perkantoran diperlukan penyediaan sarana dan prasarana baik yang diperoleh sendiri maupun dari pihak lain (penyediaan tenaga outsourcing, langganan layanan listrik, air, internet, dll). Disamping itu, agar sarana prasarana yang tersedia dapat beroperasi dengan baik untuk mendukung kelancaran operasional kegiatan, maka diperlukan pemeliharaan dan perawatan maupun perbaikan terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki secara periodik.	Tersedianya alokasi anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	1) Pengalokasian dan pembayaran gaji dan tunjangan melekat pegawai 2) Perhitungan capaian kinerja dan pembayaran tunjangan kinerja pegawai	14.932.432.000
						Mendukung kelancaran operasional perkantoran dan menjamin kelayakan fungsi sarana prasarana perkantoran dalam mendukung capaian kinerja satker	1) Pembayaran biaya langganan daya dan jasa untuk operasional perkantoran (listrik, telepon, air, jaringan internet) 2) Pembayaran gaji dan tunjangan karyawan kontrak 3) Pembayaran honor operasional satuan kerja 4) Pembelian barang keperluan perkantoran 5) Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran (gedung, kendaraan bermotor, mesin peralatan dan inventaris perkantoran)	6.035.666.000
958	Layanan Hubungan Masyarakat	1	Layanan	Pengelolaan Data dan Informasi  Pengelolaan Majalah	Sebagai wujud upaya pelaksanaan transformasi digital melalui penerapan <i>e-Governance</i> di lingkungan Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, BBSPJPI telah melakukan upaya pengembangan sistem informasi terintegrasi secara berkelanjutan melalui pengembangan Sistem Informasi Digital Balai Terintegrasi (SINDI) yang diarahkan untuk mendukung kebijakan penerapan e-office dan e-services. Guna mewujudkan hal tersebut, pengembangan dan pemeliharaan terhadap sarana prasarana pendukung sistem informasi perlu dilakukan setiap tahunnya guna memastikan agar sistem informasi berfungsi dan mampu beroperasi dalam mendukung kinerja balai. Disamping itu, BBSPJPI selaku penyelenggara layanan kepada masyarakat sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukan meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan informasi, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi. Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai bentuk penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik, BBSPJPI telah membentuk Tim PPIID yang bertugas dalam pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik. BBSPJPI juga turut mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan yang lebih cepat, akurat dan akuntabel melalui sistem informasi manajemen website. Selain itu BBSPJPI juga mengelola media sosial sebagai bentuk perwujudan upaya mensosialisasikan keberadaan sekaligus fungsi peranan BBSPJPI kepada masyarakat sekaligus upaya pengkomunikasian kebijakan dan langkah strategis termasuk kegiatan pelayanan yang dijalankan BBSPJPI kepada masyarakat.  BBSPJPI sebelumnya telah memiliki media publikasi berupa penerbitan jurnal ilmiah, Jurnal Riset Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (JRTPI) yang dikelola oleh Tim Penerbitan Majalah/Jurnal TPI BBSPJPI dan telah terakreditasi sebagai jurnal online terakreditasi nasional. Keberadaan media publikasi jurnal telah dimanfaatkan sebagai salah satu sarana dalam menjalin jejaring dengan pihak/institusi lain dengan lingkup kompetensi yang sama. Dengan memanfaatkan pengalaman yang dimiliki terkait pengelolaan media publikasi serta mempertimbangkan bahwa lingkup penelitian tidak lagi menjadi tust dari BBSPJPI, maka publikasi jurnal kedepannya akan dikelola menjadi pengelolaan majalah BBSPJPI. Keberadaan media publikasi berupa penerbitan majalah BBSPJPI akan dimanfaatkan sebagai salah satu sarana untuk mempublikasikan/mendiseminasikan hasil kinerja BBSPJPI sekaligus sebagai media promosi atas kemampuan pemberian layanan BBSPJPI terkait pencegahan dan penanganan pencemaran industri. Dengan demikian diharapkan keberadaan BBSPJPI akan semakin diketahui oleh publik khususnya sektor industri dalam mencari rujukan terkait solusi permasalahan menyangkut lingkungan yang dihadapi sektor industri.	1) Upaya penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik 2) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung penerapan e-office dan e-services guna mewujudkan operasional administrasi perkantoran dan pelayanan yang lebih cepat, akurat dan akuntabel	1) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan website 2) Pemeliharaan fasilitas jaringan internet balai 3) Koordinasi pelaksanaan kegiatan PPIID 4) Pengelolaan media sosial balai	361.888.000
						1) Penerbitan majalah yang memuat informasi layanan dan capaian kinerja BBSPJPI [2] Upaya publikasi dan promosi atas kapabilitas dan kinerja BBSPJPI	Pengelolaan dan penerbitan majalah	14.400.000
962	Layanan Umum	1	Layanan	Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga	Rumah tangga balai memiliki fungsi dan peranan dalam memberikan pelayanan kepada seluruh Stakeholder internal balai guna memastikan agar operasional perkantoran berjalan normal dalam mendukung kinerja balai diantaranya dengan melakukan pemeliharaan terhadap sarpras dan pengelolaan arsip dokumen. Berkaitan dengan pengelolaan internal balai, guna memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dijalankan BBSPJPI dalam mendukung pencapaian kinerja dilakukan secara efisien dan produktif sesuai standar kerja yang telah ditetapkan, maka guna mencapai hal tersebut BBSPJPI berkomitmen untuk menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001. Berkaitan dengan hal tersebut, guna memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diterapkan secara konsisten sesuai standar, maka setiap tahunnya dilakukan proses asesmen (reakreditasi maupun survivals) oleh pihak asesor eksternal. Selain itu, unit bagian umum dan rumah tangga juga bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan internal balai sekaligus berkoordinasi dengan unit UKPBJ Kemenperin untuk pelaksanaan lelang pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui tender.	Pemberian pelayanan kepada stakeholder internal di lingkungan BBSPJPI untuk mencapai tujuan dari organisasi	1) Koordinasi Pengembangan Sistem Manajemen Mutu dan Akreditasi Balai 2) Pengelolaan dokumen kearsipan 3) Koordinasi pelaksanaan pemeliharaan sarpras perkantoran 4) Koordinasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan balai	85.880.000

**SATUAN 3B**  
**BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/RO	TARGET	SATUAN	KOMPONEN KEGIATAN	LATAR BELAKANG	TUJUAN	RUANG LINGKUP	KEBUTUHAN ANGGARAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							2.724.116.000
951	Layanan Sarana Internal	75	Unit	Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi	BBSJPJPI dalam rangka mendukung implementasi program Making Indonesia 4.0 diantaranya dengan melakukan upaya transformasi digital dalam kegiatan operasional administrasi perkantoran utamanya terkait dengan kegiatan pelayanan. Langkah yang dilakukan diantaranya melalui pengembangan Digital Center Layanan Publik BBSJPJPI yang telah diresmikan oleh Menteri Perindustrian pada tanggal 22 Juni 2020. Lingkup pengembangan inovasi dalam penerapan layanan secara digital dalam rangka penerapan prinsip <i>e-Governance</i> dan peningkatan kualitas jasa layanan kepada pelanggan juga dilakukan diantaranya dilakukan melalui penerapan e-Jasa Pelayanan/ <i>e-Services</i> . Dalam hal ini operasional layanan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan meningkatkan kualitas jasa layanan BBSJPJPI. Salah satu strategi untuk mewujudkan pengembangan Digital Center Layanan Publik BBSJPJPI diantaranya melalui pengembangan Platform Sistem Informasi Digital Balai Terintegrasi (SINDII) untuk membantu meningkatkan kualitas jasa layanan BBSJPJPI, baik kepada pelanggan internal balai maupun eksternal (industri). Disamping itu, dengan diterapkannya kebijakan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan amanat dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018, maka penggunaan aplikasi/sistem informasi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan kedepannya akan semakin meningkat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel melalui pelaksanaan Program Digitalisasi Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk mendukung pengembangan dan kebijakan digitalisasi nasional diperlukan penyediaan fasilitas prasarana diantaranya melalui penyediaan perangkat komputer dan perangkat penunjang sistem informasi.	Tersedianya perangkat sarana penunjang sistem informasi untuk mendukung penerapan e-office dan e-services	1) Identifikasi volume, jenis dan spesifikasi kebutuhan perangkat komputer dan jaringan 2) Persiapan pengadaan (penyusunan RUP, dokumen pengadaan, jadwal pengadaan) 3) Proses pengadaan 4) Pengadaan oleh Penyedia dan proses serah terima barang	915.800.000
		62	Unit	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran	Dalam menunjang pelaksanaan operasional perkantoran, BBSJPJPI dilengkapi dengan berbagai sarana prasarana inventaris perkantoran. Setiap tahunnya perlu dilakukan pengadaan inventaris perkantoran baik berupa pengadaan inventaris perkantoran baru yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan operasional perkantoran maupun yang berfungsi untuk menggantikan fungsi inventaris perkantoran sebelumnya yang kondisinya telah rusak sebagaimana telah disampaikan pada laporan BMN pada daftar kondisi barang.	Penambahan dan penggantian peralatan inventaris perkantoran yang telah rusak untuk mendukung kelancaran operasional perkantoran	1) Identifikasi volume, jenis dan spesifikasi kebutuhan sarpras perkantoran 2) Persiapan pengadaan (penyusunan RUP, dokumen pengadaan, jadwal pengadaan) 3) Proses pengadaan 4) Pengadaan oleh Penyedia dan proses serah terima barang	330.530.000
		2	Unit	Pengadaan Kendaraan Bermotor	BBSJPJPI saat ini memiliki Barang Milik Negara berupa kendaraan operasional roda empat sebanyak 7 unit dengan kondisi 6 unit dalam kondisi baik dan 1 unit dalam kondisi rusak ringan sedangkan untuk kendaraan dinas jabatan saat ini belum dimiliki. Sementara untuk kendaraan operasional roda dua, BBSJPJPI saat ini telah memiliki 2 unit kendaraan roda dua operasional yang keseluruhannya dalam kondisi baik. Keberadaan kendaraan operasional sangat berperan dalam mendukung mobilitas personil BBSJPJPI baik dalam menunjang pelaksanaan tugas administrasi perkantoran maupun dalam mendukung operasional layanan. Pada tahun 2025, BBSJPJPI sesuai dengan Rencana Kebutuhan BMN, berencana untuk melakukan pengadaan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan untuk menunjang mobilitas pimpinan satker serta 1 (satu) unit kendaraan operasional roda dua untuk menunjang mobilitas personil dalam rangka proses koordinasi dengan Stakeholder di sekitar wilayah kerja satker.	Penyediaan prasarana penunjang mobilitas personil	1) Identifikasi volume, jenis dan spesifikasi kebutuhan sarpras perkantoran 2) Persiapan pengadaan (penyusunan RUP, dokumen pengadaan, jadwal pengadaan) 3) Proses pengadaan 4) Pengadaan oleh Penyedia dan proses serah terima barang	677.786.000
971	Layanan Prasarana Internal	2	Unit	Pembangunan / Renovasi Gedung dan Bangunan	Guna mendukung pelaksanaan tupoksi dan penyediaan layanan jasa teknis, selain didukung dengan SDM yang berkompeten, BBSJPJPI juga memiliki sarana berupa gedung perkantoran yang berlokasi di Jalan Ki Mangunsarkoro No. 6 Semarang. Gedung perkantoran yang dimiliki BBSJPJPI memiliki tiga lantai dengan total luasan lantai 5.230 m <sup>2</sup> . Gedung tersebut berfungsi sebagai ruang laboratorium (pengujian, kalibrasi, liibang), ruang kerja, ruang rapat dan aula serta fasilitas pendukung seperti perpustakaan, mushola, gudang dan TPS B3. Beberapa fungsi bangunan seiring dengan waktu, kondisinya semakin menurun dan tidak lagi dapat ditangani melalui pekerjaan pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi dan fungsi bangunan. Fungsi bangunan khususnya ruang laboratorium sangat vital dalam mendukung operasional layanan dimana bangunan laboratorium diharapkan memenuhi standar fungsi laboratorium sebagaimana dipersyaratkan dalam ISO 17025 terkait persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. Menindaklanjuti hal tersebut, maka pada tahun 2025 direncanakan untuk dilakukan peningkatan kapasitas bangunan Laboratorium Instrumen dan Laboratorium Optimalisasi Teknologi guna mendukung peningkatan kualitas layanan dan kelancaran administrasi perkantoran.	Terlaksananya pekerjaan fisik peningkatan kapasitas bangunan gedung BBSJPJPI secara tepat waktu serta memenuhi ketentuan dan persyaratan teknis bangunan gedung negara dan syarat umum laboratorium	1) Pemilihan Penyedia jasa konsultan Perencana 2) Penyusunan dokumen perencanaan peningkatan kapasitas gedung 3) Pelelangan pekerjaan fisik peningkatan kapasitas gedung 4) Pemilihan penyedia jasa konsultan Pengawas Konstruksi 5) Proses pekerjaan fisik peningkatan kapasitas gedung 6) Koordinasi pengawasan dengan Dinas Cipta Karya PU Prop Jateng dan Konsultan Pengawas Konstruksi 7) Proses pemeliharaan dan serah terima pekerjaan	800.000.000
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal							1.145.436.000
954	Layanan Manajemen SDM	107	Orang	Pengelolaan/ Manajemen SDM	Upaya penerapan Reformasi Birokrasi dapat dilakukan diantaranya melalui upaya penerapan manajemen sumber daya manusia pegawai negeri sipil yang mencakup penataan sistem rekrutmen pegawai, analisis jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi jabatan, asesmen individu berdasarkan kompetensi, penerapan sistem penilaian kinerja individu, pembangunan/ pengembangan database pegawai, dan pengembangan diklat pegawai berbasis kompetensi. Disamping itu juga perlu dilakukan upaya penerapan pola karier pegawai yang menunjang pada pengembangan organisasi. Terkait pembinaan pola karier PNS, BBSJPJPI dalam melaksanakan pembinaan karier pegawai telah menggunakan sistem pola karir sesuai dengan Permenperin No. 91/M-IND/PER/11/2007 tentang Pedoman Mutasi Jabatan dan Pengembangan Karir Pegawai Kementerian Perindustrian. Dengan adanya penerapan kebijakan pola karir tersebut diharapkan mampu membentuk pribadi PNS BBSJPJPI yang disiplin dan profesional sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja pegawai.	1) Penerapan kebijakan pola karir pegawai dan budaya kerja untuk mendukung pengembangan organisasi 2) Peningkatan disiplin kerja pegawai	1) Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian 2) Pembinaan jabatan struktural dan fungsional di lingkungan satker BBSJPJPI 3) Pembinaan disiplin pegawai 4) Koordinasi dan pelaksanaan proses rekrutmen CPNS/PPPK	329.182.000
996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	50	Orang	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM	Pada organisasi pemerintah, kompetensi SDM merupakan suatu tolak ukur keberhasilan pengelolaan organisasi dalam mewujudkan target kinerja, maka secara berjenjang sangatlah perlu dilakukan upaya peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM baik yang bersifat pembinaan manajemen kepegawaian maupun diklat teknis untuk menunjang kemampuan sistem pola karir sesuai dengan Permenperin No. 91/M-IND/PER/11/2007 tentang Pedoman Mutasi Jabatan dan Pengembangan Karir Pegawai Kementerian Perindustrian. Dengan adanya penerapan kebijakan pola karir tersebut diharapkan mampu membentuk pribadi PNS BBSJPJPI yang disiplin dan profesional sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja pegawai. Pada organisasi pemerintah, kompetensi SDM merupakan suatu tolak ukur keberhasilan pengelolaan organisasi dalam mewujudkan target kinerja, maka secara berjenjang sangatlah perlu dilakukan upaya peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM baik yang bersifat pembinaan manajemen kepegawaian maupun diklat teknis untuk menunjang kemampuan sistem pola karir sesuai dengan Permenperin No. 91/M-IND/PER/11/2007 tentang Pedoman Mutasi Jabatan dan Pengembangan Karir Pegawai Kementerian Perindustrian. Dengan adanya penerapan kebijakan pola karir tersebut diharapkan mampu membentuk pribadi PNS BBSJPJPI yang disiplin dan profesional sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja pegawai. Sesuai PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 34, setiap CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses diklat terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Dari sisi aspek teknis, dalam kegiatan operasionalnya BBSJPJPI didukung oleh personil dari berbagai jabatan fungsional. Untuk mendukung pengembangan kelembagaan BBSJPJPI, maka perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan untuk SDM jabatan fungsional tersebut sesuai dengan pola karier yang ditetapkan dalam masing-masing jabatan fungsional termasuk pelaksanaan uji kompetensi yang diperlukan pada saat naik tingkat jenjang jabatan fungsional. Sementara itu, untuk mendukung peningkatan kapasitas dan kualitas layanan jasa teknis kepada masyarakat, BBSJPJPI secara berkala berupaya untuk meningkatkan kompetensi SDM melalui pelaksanaan pelatihan teknis baik dilakukan oleh penyedia eksternal maupun melalui pelaksanaan <i>In House Training</i> .	1) Peningkatan kompetensi teknis SDM untuk menunjang pencapaian kinerja organisasi 2) Peningkatan indeks profesionalitas ASN BBSJPJPI	1) Pelaksanaan Diklat Pelatihan Dasar ASN dan Diklat Pola Karir ASN 2) Pelaksanaan Diklat Teknis Fungsional 3) Pelaksanaan pelatihan teknis penunjang layanan 4) Evaluasi hasil peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM	816.254.000

**SATUAN 3B**  
**BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/RO	TARGET	SATUAN	KOMPONEN KEGIATAN	LATAR BELAKANG	TUJUAN	RUANG LINGKUP	KEBUTUHAN ANGGARAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal							282.683.000
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2	Dokumen	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang penyusunan RKA-KL perlu dilakukan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran pada satker BBSPJPI yang memuat informasi kinerja dan rincian anggaran. Dalam pelaksanaan program kegiatan tahun berjalan maupun penyusunan program kegiatan periode tahun anggaran berikutnya perlu berkoordinasi dengan unit eselon I BSKJI agar perumusan kegiatan dan pengalokasian anggaran dapat sejalan dengan target kinerja yang ditetapkan dalam RPJP/RPJM, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Renstra Kementerian, dan Renstra BSKJI serta Renstra internal BBSPJPI sekaligus selaras dengan Konsep Redesign Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP).	Tersusunnya program kegiatan dan tersedianya alokasi anggaran BBSPJPI yang selaras dengan rencana kinerja Pemerintah, Kemenperin dan unit kerja eselon I BSKJI	1) Koordinasi pelaksanaan program tahun berjalan 2) Penyusunan dan pelaksanaan review atas dokumen perencanaan kinerja dan penganggaran periode tahun anggaran berikutnya	45.906.000
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2	Dokumen	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 disampaikan bahwa tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sebagai bentuk perwujudan tindak lanjut Inpres No 7 Tahun 1999, setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, seluruh satker di lingkungan instansi pemerintah berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan program, kegiatan, anggaran, dan permasalahan yang dihadapi secara berkala setiap Triwulan. Sementara itu pada setiap akhir tahun anggaran sesuai amanat Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap satker juga turut diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK). Berkenaan dengan hal tersebut, untuk memonitoring capaian kinerja satker BBSPJPI pada tahun berjalan sekaligus sebagai bagian tahapan proses penyusunan laporan akuntabilitas kinerja perlu dilakukan monev kegiatan dengan berkoordinasi dengan internal bagian/bidang BBSPJPI dan Unit Eselon I BSKJI. Adapun evaluasi atas penerapan SAKIP di internal satker dilakukan evaluasi SAKIP oleh Tim Inspektorat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian.	Penerapan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu perwujudan Reformasi Birokrasi	1) Koordinasi dan monitoring capaian kinerja tahun berjalan 2) Pelaksanaan evaluasi SAKIP 3) Pelaksanaan audit kinerja satker dan koordinasi tindak lanjut hasil audit kinerja 4) Penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja	44.061.000
955	Layanan Manajemen Keuangan	2	Dokumen	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	Ditinjau dari aspek pengelolaan dan pelaporan keuangan, BBSPJPI berupaya menjalankan sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan dan aset BMN yang baik dan akuntabel diantaranya melalui perencanaan/implementasi/pengelolaan SAP/SAK. Setiap tahunnya sesuai ketentuan UU No.17 Thn 2003, UU No.1 Thn 2004, UU No.15 Thn 2004 setiap unit kerja juga diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan sbg bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Selaku entitas bisnis dengan ditetapkannya BBSPJPI sebagai satker BLU berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 59 Tahun 2010, maka atas Laporan Keuangan yang telah disusun tersebut wajib untuk dilakukan audit oleh auditor eksternal independen dalam hal ini dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pada proses penyusunan Laporan Keuangan dalam rangka memberikan keyakinan bahwa Pelaporan Keuangan telah dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai maka perlu dilakukan proses Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang dijalankan di setiap entitas akuntansi.	Mewujudkan tata kelola keuangan dan BMN yang akuntabel	1) Koordinasi pertanggungjawaban keuangan APBN dan pengadministrasian pengelolaan aset BMN 2) Penyusunan dan pelaksanaan rekonsiliasi pelaporan keuangan dan BMN dengan instansi terkait 3) Pelaksanaan Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) 4) Pelaksanaan audit Laporan Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik	139.620.000
961	Layanan Reformasi Kinerja	2	Dokumen	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ ZonalIntegritas/SPIP	Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Bentuk kongkret upaya pelaksanaan program reformasi birokrasi yakni melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Seluruh jajaran BBSPJPI sendiri berkomitmen secara konsisten untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini ditandai dengan perolehan penghargaan dari Kementerian PAN dan RB serta Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai instansi yang menerapkan Zona Integritas dan mendapat predikat satker Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2017 serta selanjutnya predikat satker Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2020. Kedepannya upaya pembangunan Zona Integritas di lingkungan BBSPJPI perlu dievaluasi secara berkala dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Setiap tahunnya BBSPJPI selaku unit yang memberikan pelayanan publik juga turut berpartisipasi pada pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) dengan menampilkan inovasi pelayanan yang telah diterapkan BBSPJPI. Untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel juga diupayakan melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sebagai institusi pemerintah, BBSPJPI turut mempunyai kewajiban menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.	1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik 2) Meningkatnya tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP ke tingkat terkelola dan terukur	1) Koordinasi pelaksanaan dan evaluasi penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas 2) Partisipasi pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) 3) Penerapan dan evaluasi maturitas SPIP	53.096.000

## REKAP 3: KEGIATAN K/L

### RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

#### TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. PROGRAM : EC - Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas  
02 - Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0  
03 - Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa serta Industri Halal Dalam Negeri
4. KEGIATAN : 6077 - Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 07 - Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan  
08 - Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil  
09 - Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik  
10 - Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro  
11 - Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa  
12 - Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim  
13 - Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin  
14 - Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam  
15 - Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik  
16 - Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri  
18 - Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik  
17 - Balai Riset dan Standardisasi Industri  
21 - Pusat Penelitian Dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika  
23 - Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri  
04 - Sekretariat Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri  
22 - Badan Standardisasi Dan Kebijakan Jasa Industri

#### 6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Meningkatnya daya saing industri pengolahan nonmigas		535.592.736,0
01.01	Potensi Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang mengikuti rintisan teknologi	85	
01.02	Persentase rekomendasi kebijakan jasa industri yang dimanfaatkan oleh satker pembina/stakeholder jasa industri	80	
02	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0		38.321.119,0
02.01	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang telah dilaksanakan pembimbingan dan pendampingan industri 4.0	25	
02.02	Persentase rekomendasi di bidang industri 4.0 yang dimanfaatkan oleh satker pembina/stakeholder	70	
03	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri		136.033.384,0



KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Riau	Kota Pekanbaru								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado								48.531,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								38.050,0
	<b>051 - Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis</b>										24.305.526,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								40.526,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang								750.000,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								23.515.000,0
	<b>051 - Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis</b>										434.899,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								250.000,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Kota Samarinda								184.899,0
01.AEC.003	<b>Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis Industri Kulit, Karet dan Plastik</b>								000 - Bukan Tematik		30.000,0
	<b>051 - Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis</b>										30.000,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta								30.000,0
01.AEC.006	<b>Kerjasama Pemanfaatan teknologi dan layanan Teknis Industri Kerajinan dan Batik</b>								000 - Bukan Tematik		75.000,0



















KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur								130.000,0
01.BAD.013	Jasa pelayanan teknis kalibrasi industri kimia, farmasi dan kemasan								000 - Bukan Tematik		490.234,0
	051 - Layanan Kalibrasi										364.234,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur								364.234,0
	052 - Akreditasi/ Survailen/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kalibrasi										126.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur								126.000,0
01.BAD.014	Jasa pelayanan teknis kalibrasi industri tekstil								000 - Bukan Tematik		300.000,0
	051 - Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi										300.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung								300.000,0
01.BAD.015	Jasa pelayanan teknis kalibrasi industri kulit, karet dan plastik								000 - Bukan Tematik		300.000,0
	051 - Jasa pelayanan teknis kalibrasi										222.700,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta								222.700,0
	052 - Akreditasi/ Survailen/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kalibrasi										77.300,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta								77.300,0
01.BAD.016	Jasa pelayanan teknis kalibrasi industri agro								000 - Bukan Tematik		1.000.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Layanan Kalibrasi										1.000.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bogor								1.000.000,0
01.BAD.017	Jasa pelayanan teknis kalibrasi industri selulosa								000 - Bukan Tematik		178.300,0
	051 - Jasa pelayanan teknis kalibrasi										130.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bandung								130.000,0
	052 - Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kalibrasi										48.300,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bandung								48.300,0
01.BAD.018	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim								000 - Bukan Tematik		200.000,0
	051 - Jasa pelayanan teknis kalibrasi										200.000,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar								200.000,0
01.BAD.019	Jasa pelayanan teknis kalibrasi industri Logam dan Mesin								000 - Bukan Tematik		585.715,0
	051 - Jasa pelayanan teknis kalibrasi										585.715,0
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung								585.715,0
01.BAD.020	Jasa pelayanan teknis kalibrasi Industri Keramik dan Mineral Nonlogam								000 - Bukan Tematik		130.000,0
	051 - Jasa pelayanan teknis kalibrasi										130.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung								130.000,0
01.BAD.021	Jasa pelayanan teknis Kalibrasi dan Standardisasi Industri Bahan dan Barang Teknik								000 - Bukan Tematik		3.500.000,0

















KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.BAD.038	Jasa Pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri Logam dan Mesin								000 - Bukan Tematik		315.946,0
	051 - Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis										315.946,0
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung								315.946,0
01.BAD.039	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri kulit, karet dan plastik								000 - Bukan Tematik		200.000,0
	051 - Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri										200.000,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta								200.000,0
01.BAD.040	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri agro								000 - Bukan Tematik		700.000,0
	051 - Layanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri Agro										700.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bogor								700.000,0
01.BAD.042	Jasa pelayanan inspeksi teknik industri agro								000 - Bukan Tematik		500.000,0
	051 - Layanan inspeksi teknis										500.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bogor								500.000,0
01.BAD.043	Jasa pelayanan inspeksi teknik industri Logam dan Mesin								000 - Bukan Tematik		200.000,0
	051 - Jasa pelayanan inspeksi teknik										200.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung								200.000,0
01.BAD.044	Jasa pelayanan konsultasi teknis/manajemen industri kulit, karet dan plastik								000 - Bukan Tematik		100.000,0











KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.BAD.068	Jasa penelitian dan pengembangan BBKB								000 - Bukan Tematik		0,0
01.BAD.069	Jasa pemanfaatan teknologi BBK								000 - Bukan Tematik		0,0
01.BAD.070	Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri Industri Keramik dan Mineral Nonlogam								000 - Bukan Tematik		500.000,0
	051 - Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri										350.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung								350.000,0
	052 - Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri 4.0										150.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung								150.000,0
01.BAD.071	Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri Kerajinan dan Batik								000 - Bukan Tematik		80.000,0
	051 - Jasa pemanfaatan teknologi industri Kerajinan dan Batik										80.000,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta								80.000,0
01.BAD.072	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri kimia, farmasi dan kemasan								000 - Bukan Tematik		0,0
01.BAD.073	Jasa pelayanan konsultasi teknis/manajemen industri kimia, farmasi dan kemasan								000 - Bukan Tematik		329.719,0
	051 - Layanan Pendampingan dan Konsultasi										329.719,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur								329.719,0
01.BAD.074	Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri kimia, farmasi dan kemasan								000 - Bukan Tematik		88.025,0









KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta								50.000,0
	052 - Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Uji Profisiensi										30.000,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta								30.000,0
01.BAD.089	Jasa pelayanan pemeriksa dan pengujian produk halal industri kulit, karet dan plastik								000 - Bukan Tematik		300.000,0
	051 - Layanan pemeriksa dan pengujian produk halal										260.000,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta								260.000,0
	052 - Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Pemeriksa Halal										40.000,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta								40.000,0
01.BAD.093	Jasa Pelayanan Proses dan Mesin Industri Kulit, Karet dan Plastik								000 - Bukan Tematik		69.650,0
	051 - Miniplant Karet										30.000,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta								30.000,0
	052 - Miniplant Kulit										39.650,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta								39.650,0
01.BAD.094	Jasa Pelayanan Inspeksi Teknik Industri Tekstil								000 - Bukan Tematik		75.000,0
	051 - Layanan Jasa inspeksi teknik										75.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung								75.000,0
01.BAD.095	Jasa pelayanan konsultasi teknis/manajemen industri								000 - Bukan Tematik		0,0

















KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bandung								317.890,0
	051 - Peralatan Fasilitas Laboratorium/Workshop/Layanan										232.911,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bandung								232.911,0
01.CAH.023	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan industri Logam dan Mesin								000 - Bukan Tematik		2.000.000,0
	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit										1.000.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung								1.000.000,0
	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit										1.000.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung								1.000.000,0
01.CAH.024	Kendaraan bermotor roda 4/ roda 2 operasional layanan industri Logam dan Mesin								000 - Bukan Tematik		0,0
	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit										0,0
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung								0,0
01.CAH.026	Peningkatan fasilitas pengembangan industri benefisiasi mineral non logam								000 - Bukan Tematik		10.000.000,0
	051 - Peralatan pengembangan industri benefisiasi mineral non logam										10.000.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung								10.000.000,0
01.CBL	Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan										7.386.589,0
01.CBL.002	Gedung laboratorium/workshop/layanan yang dibangun/direnovasi Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim								000 - Bukan Tematik		2.000.000,0

















KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan								0,0
03.ABK.003	Penyusunan Regulasi Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri Pusat OPTIKJI								000 - Bukan Tematik		0,0
	051 - Penyusunan Kebijakan Teknis Pemilihan Pemanfaatan Teknologi Industri										0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan								0,0
	052 - Penyusunan Kebijakan Teknis Penjaminan Resiko Pemanfaatan Teknologi Industri										0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan								0,0
	053 - Penyusunan Kebijakan Teknis Pengendalian Pemanfaatan Teknologi Industri melalui Audit Teknologi Industri										0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan								0,0
	054 - Penyusunan Kebijakan Teknis Standar Spesifikasi Teknologi Industri										0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan								0,0
	055 - Penyusunan Pedoman Pemberian Penghargaan Bidang Teknologi Industri										0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan								0,0
03.ABK.004	Kajian Ilmiah Pemanfaatan Teknologi Industri Pusat OPTIKJI								000 - Bukan Tematik		0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Perencanaan, perumusan dan pemantauan kebijakan jasa industri										0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan								0,0
03.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria										0,0
03.AFA.001	NSPK Jasa Industri Pusat OPTIKJI								000 - Bukan Tematik		0,0
	051 - Penyusunan NSPK Jasa Industri										0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan								0,0
03.BDI	Fasilitas dan Pembinaan Industri										1.100.000,0
03.BDI.003	Pemanfaatan Teknologi Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim								000 - Bukan Tematik		600.000,0
	051 - Pendampingan Peningkatan Teknologi										305.000,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar								305.000,0
	052 - Konsultasi Industri										295.000,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar								295.000,0
03.BDI.005	Pemanfaatan Teknologi Industri Kulit, Karet dan Plastik								000 - Bukan Tematik		70.000,0
	051 - Pemanfaatan paket teknologi/supervisi/konsultasi										70.000,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta								70.000,0
03.BDI.009	Pemanfaatan Teknologi Industri Bahan dan Barang Teknik								000 - Bukan Tematik		200.000,0









KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
05.AEC.005	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim								000 - Bukan Tematik		0,0
	051 - Kerjasama Peningkatan Layanan Jasa Teknis Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim										0,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar								0,0
05.AEC.007	Kerjasama Pemanfaatan teknologi dan layanan teknis industri Logam dan Mesin								000 - Bukan Tematik		223.130,0
	051 - Kerja Sama Pemanfaatan teknologi dan Layanan Teknis										223.130,0
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung								223.130,0
05.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi										600.000,0
05.AEF.002	Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Teknis Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim								000 - Bukan Tematik		600.000,0
	051 - Sosialisasi Layanan Jasa Teknis										600.000,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar								600.000,0
05.AEF.007	Sosialisasi dan Diseminasi Kebijakan Jasa Industri Pusat OPTIKJI								000 - Bukan Tematik		0,0
	051 - Sosialisasi dan Diseminasi Kebijakan Jasa Industri										0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan								0,0
05.BAD	Pelayanan Publik kepada industri										11.049.321,0
05.BAD.041	Jasa Pelayanan Pemeriksa dan Pengujian Produk Halal Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim								000 - Bukan Tematik		400.000,0



KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	053 - Penilaian Teknologi yang dapat diterapkan di IKM										0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan								0,0
05.PBK.003	Kebijakan Teknis Jasa Industri								000 - Bukan Tematik		0,0
	051 - Kebijakan Teknis Jasa Industri										0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan								0,0
05.PDA	Standarisasi Produk										0,0
05.PDA.001	Pengembangan Bahan acuan standar								000 - Bukan Tematik		0,0
	051 - Pengembangan bahan acuan standar (standard reference material) berbasis karet dan Lembaga Produsen Bahan Acuan (PBA)										0,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta								0,0
05.QAD	Pelayanan Publik kepada industri										0,0
05.QAD.001	Jasa pelayanan teknis pengujian dan sertifikasi								000 - Bukan Tematik		0,0
	051 - Penguatan Lembaga Pengujian dan Sertifikasi Produk BSPJI Padang dalam rangka Penerapan SNI Wajib AMDK										0,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang								0,0
05.RAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan										104.030.000,0
05.RAH.001	Peralatan Fasilitas Laboratorium/Workshop/Layanan								000 - Bukan Tematik		104.030.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/layanan publik										104.030.000,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang								4.030.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan								100.000.000,0
05.RAH.002	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan industri agro								000 - Bukan Tematik		0,0
	051 - Pengembangan layanan Uji Masa Simpan Pangan										0,0
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bogor								0,0
	052 - Pengembangan layanan Penyedia Bahan Acuan (PBA)										0,0
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bogor								0,0
	053 - Modernisasi Peralatan Laboratorium Pengujian										0,0
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bogor								0,0
05.RBL	Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan										20.000.000,0
05.RBL.001	Gedung Layanan Publik/Laboratorium yang direnovasi								000 - Bukan Tematik		20.000.000,0
	051 - Renovasi Gedung Layanan Publik/Laboratorium										20.000.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan								20.000.000,0
<b>Total</b>											<b>854.909.690,0</b>

**B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)**

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Meningkatnya daya saing industri pengolahan nonmigas				535.592.736,0				293.457.289,0	294.634.111,0	331.737.366,5
01.ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM		Rekomendasi Kebijakan/ Kajian		0,0				0,0	0,0	0,0
01.ABK.006	Analisis, Penerapan, dan Pengawasan Standardisasi Industri	0	Rekomendasi Kebijakan		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.AEC	Kerja sama		Kesepakatan/ Dokumen/ Kegiatan		75.107.305,0				76.717.312,0	76.854.869,0	77.109.363,8
01.AEC.001	Kerjasama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis Industri Tekstil	3	Dokumen		50.000,0	3	3	3	80.000,0	80.000,0	80.000,0
01.AEC.001.051	Kerjasama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis Industri Tekstil	3,0	dokumen	16.666,7	50.000,0	3,0	3,0	3,0	80.000,0	80.000,0	80.000,0
01.AEC.002	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis	18	Dokumen		74.827.006,0	18	19	19	76.376.254,0	76.503.029,0	76.746.181,8
01.AEC.002.051	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis	5,0	Dokumen	10.017.316,2	50.086.581,0	5,0	5,0	5,0	50.088.483,0	50.090.481,0	50.092.579,0
01.AEC.002.051	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis	9,0	Dokumen	2.700.614,0	24.305.526,0	9,0	10,0	10,0	25.797.771,0	25.852.548,0	26.058.602,8
01.AEC.002.051	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis	7,0	Dokumen	62.128,4	434.899,0	7,0	7,0	7,0	490.000,0	560.000,0	595.000,0
01.AEC.003	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis Industri Kulit, Karet dan Plastik	5	Dokumen		30.000,0	5	5	5	35.000,0	40.000,0	45.000,0
01.AEC.003.051	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis	5,0	Kegiatan	6.000,0	30.000,0	5,0	5,0	5,0	35.000,0	40.000,0	45.000,0
01.AEC.006	Kerjasama Pemanfaatan teknologi dan layanan Teknis Industri Kerajinan dan Batik	5	Dokumen		75.000,0	5	5	5	100.000,0	105.000,0	110.000,0
01.AEC.006.051	Kerja sama pemanfaatan teknologi dan layanan teknis	5,0	Dokumen	15.000,0	75.000,0	5,0	5,0	5,0	100.000,0	105.000,0	110.000,0
01.AEC.008	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis Industri Kimia, Farmasi dan Kemasan	1	Dokumen		25.299,0	1	1	1	26.058,0	26.840,0	28.182,0
01.AEC.008.051	Fasilitasi kemitraan layanan jasa industri kimia, farmasi, dan kemasan	1,0	Dokumen	25.299,0	25.299,0	1,0	1,0	1,0	26.058,0	26.840,0	28.182,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.AEC.009	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis Industri Bahan dan Barang Teknik	1	Dokumen		100.000,0	1	1	0	100.000,0	100.000,0	100.000,0
01.AEC.009.051	Kerja sama pemanfaatan teknologi dan layanan teknis	1,0	Dokumen	100.000,0	100.000,0	1,0	1,0	1,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0
01.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi		orang		8.711.093,0				9.849.896,0	10.264.644,0	9.152.419,2
01.AEF.001	Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Jasa Teknis	1585	orang		4.956.008,0	1655	1770	1155	5.060.907,0	5.426.185,0	4.202.015,2
01.AEF.001.051	Sosialisasi Layanan Jasa Teknis	395,0	Orang	3.202,5	1.265.000,0	445,0	400,0	70,0	1.080.250,0	1.185.763,0	301.551,0
01.AEF.001.051	Sosialisasi Layanan Jasa Teknis	460,0	Orang	3.165,9	1.456.295,0	490,0	530,0	485,0	1.565.657,0	1.700.422,0	1.495.464,2
01.AEF.001.051	Sosialisasi Layanan Jasa Teknis	740,0	Orang	3.019,9	2.234.713,0	845,0	910,0	825,0	2.415.000,0	2.540.000,0	2.405.000,0
01.AEF.003	Promosi, Sosialisasi, dan Diseminasi Layanan Jasa Teknis Industri Keramik dan Mineral Nonlogam	110	orang		350.000,0	110	120	120	450.000,0	450.000,0	500.000,0
01.AEF.003.051	Sosialisasi Layanan Jasa Teknis	110,0	Orang	3.181,8	350.000,0	110,0	120,0	120,0	450.000,0	450.000,0	500.000,0
01.AEF.004	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi /Diseminasi Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis Industri Kimia, Farmasi dan Kemasan	200	orang		72.873,0	200	200	200	75.059,0	77.311,0	81.521,0
01.AEF.004.051	Sosialisasi Layanan Jasa Teknis	150,0	orang	288,9	43.332,0	150,0	150,0	150,0	44.632,0	45.971,0	47.931,0
01.AEF.004.052	Publikasi Layanan Jasa Teknis	50,0	Orang	590,8	29.541,0	50,0	50,0	50,0	30.427,0	31.340,0	33.590,0
01.AEF.005	Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Teknis Industri Kulit, Karet dan Plastik	70	orang		300.000,0	70	70	70	310.000,0	320.000,0	330.000,0
01.AEF.005.051	Sosialisasi Layanan Teknis Industri Kulit, Karet dan Plastik	35,0	orang	5.000,0	175.000,0	35,0	35,0	35,0	180.000,0	185.000,0	190.000,0
01.AEF.005.052	Publikasi Layanan Teknis Industri Kulit, Karet dan Plastik	35,0	orang	3.571,4	125.000,0	35,0	35,0	35,0	130.000,0	135.000,0	140.000,0
01.AEF.006	Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Jasa Teknis Industri Tekstil	150	orang		265.000,0	150	150	150	1.100.000,0	1.100.000,0	1.100.000,0
01.AEF.006.051	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi/Diseminasi Standardisasi, Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Jasa Teknis Industri Tekstil	150,0	orang	1.100,0	165.000,0	150,0	150,0	150,0	980.000,0	980.000,0	980.000,0
01.AEF.006.052	Publikasi Layanan Jasa Teknis	1,0	kegiatan	100.000,0	100.000,0	1,0	1,0	1,0	120.000,0	120.000,0	120.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.AEF.008	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi/Diseminasi Layanan Teknis Industri Logam dan mesin	0	orang		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.AEF.008.051	Pemasaran/Promosi/ Pameran/Publikasi Layanan Teknis	0,0	Orang	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AEF.009	Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Teknis Industri Bahan dan Barang Teknik	100	orang		980.000,0	100	100	100	980.000,0	980.000,0	980.000,0
01.AEF.009.051	Sosialisasi Layanan Teknis Industri Bahan dan Barang Teknik	100,0	Peserta	3.000,0	300.000,0	100,0	100,0	100,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0
01.AEF.009.052	Publikasi Layanan Teknis Industri Bahan dan Barang Teknik	3,0	Kegiatan	226.666,7	680.000,0	3,0	3,0	3,0	680.000,0	680.000,0	680.000,0
01.AEF.010	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi/Diseminasi Layanan Teknis Industri Kerajinan dan Batik	100	orang		900.000,0	100	100	100	950.000,0	950.000,0	950.000,0
01.AEF.010.051	Penyelenggaraan Seminar/Workshop Industri Kerajinan dan Batik	100,0	orang	6.500,0	650.000,0	100,0	100,0	100,0	700.000,0	700.000,0	700.000,0
01.AEF.010.052	Pelaksanaan Pemasaran/Promosi/ Pameran/Publikasi Layanan Teknis Industri Kerajinan dan Batik	10.000,0	orang	25,0	250.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	250.000,0	250.000,0	250.000,0
01.AEF.011	Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Teknis Industri Selulosa	100	orang		330.000,0	100	100	100	350.000,0	370.000,0	400.000,0
01.AEF.011.051	Promosi dan Temu Pelanggan	100,0	Orang	3.300,0	330.000,0	100,0	100,0	100,0	350.000,0	370.000,0	400.000,0
01.AEF.012	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi/Diseminasi Layanan Teknis industri Agro	100	orang		0,0	100	0	0	0,0	0,0	0,0
01.AEF.013	Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Teknis Pencegahan Pencemaran Industri	150	orang		557.212,0	150	150	150	573.930,0	591.148,0	608.883,0
01.AEF.013.051	Sosialisasi Layanan Jasa Teknis	150,0	orang	1.903,2	285.484,0	150,0	150,0	150,0	290.000,0	300.000,0	310.000,0
01.AEF.013.052	Publikasi Layanan Jasa Teknis	3,0	Kegiatan	90.576,0	271.728,0	3,0	3,0	3,0	283.930,0	291.148,0	298.883,0
01.BAD	Pelayanan Publik kepada industri		Industri		120.552.880,0				118.134.231,0	122.951.288,0	169.922.865,2
01.BAD.001	Jasa pelayanan teknis pengujian	2550	Industri		32.272.195,0	2495	2625	2175	22.691.315,0	20.898.842,0	14.701.777,2
01.BAD.001.051	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian	213,0	Industri	7.023,1	1.495.910,0	253,0	303,0	3,0	1.723.092,0	2.267.710,0	321.252,0
01.BAD.001.051	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian	1.487,0	Industri	14.217,2	21.140.981,0	1.352,0	1.407,0	1.242,0	10.716.746,0	8.169.035,0	6.224.769,4



KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.BAD.008	Jasa pelayanan teknis pengujian industri selulosa	175	Industri		905.000,0	185	195	205	905.000,0	905.000,0	905.000,0
01.BAD.008.051	Jasa pelayanan teknis pengujian	1.750,0	Sampel	412,5	721.900,0	1.850,0	1.950,0	2.050,0	721.900,0	721.900,0	721.900,0
01.BAD.008.052	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Pengujian	1,0	Sertifikat Akreditasi	183.100,0	183.100,0	1,0	1,0	1,0	183.100,0	183.100,0	183.100,0
01.BAD.009	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim	900	Industri		4.200.000,0	925	950	975	4.500.000,0	4.800.000,0	5.300.000,0
01.BAD.009.051	Jasa pelayanan teknis pengujian	900,0	Industri	4.666,7	4.200.000,0	925,0	950,0	975,0	4.500.000,0	4.800.000,0	5.300.000,0
01.BAD.010	Jasa pelayanan teknis pengujian industri Logam dan Mesin	350	Industri		673.480,0	360	370	380	673.480,0	673.480,0	700.000,0
01.BAD.010.051	Jasa pelayanan teknis pengujian	1.000,0	Sampel	673,5	673.480,0	1.000,0	1.000,0	1.100,0	673.480,0	673.480,0	700.000,0
01.BAD.011	Jasa pelayanan teknis pengujian Industri Kerajinan dan Batik	325	Industri		590.000,0	350	375	380	645.000,0	700.000,0	805.000,0
01.BAD.011.051	Jasa pelayanan teknis pengujian	1.000,0	Sampel	500,0	500.000,0	1.100,0	1.150,0	1.200,0	550.000,0	600.000,0	700.000,0
01.BAD.011.052	Peningkatan dan Optimalisasi Pengelolaan Lembaga (Laboratorium Uji )	1,0	Akreditasi	90.000,0	90.000,0	1,0	1,0	1,0	95.000,0	100.000,0	105.000,0
01.BAD.012	Jasa pelayanan teknis pengujian industri kimia, farmasi dan kemasan	550	Industri		2.620.797,0	600	660	730	3.807.355,0	4.564.061,0	4.925.823,0
01.BAD.012.051	Layanan Pengujian	2.558,0	Sampel	973,7	2.490.797,0	2.647,0	2.741,0	3.000,0	3.672.355,0	4.427.061,0	4.780.823,0
01.BAD.012.052	Akreditasi/ Survailen/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Pengujian	1,0	Akreditasi	130.000,0	130.000,0	1,0	1,0	1,0	135.000,0	137.000,0	145.000,0
01.BAD.013	Jasa pelayanan teknis kalibrasi industri kimia, farmasi dan kemasan	120	Industri		490.234,0	150	185	225	619.835,0	785.606,0	851.694,0
01.BAD.013.051	Layanan Kalibrasi	900,0	Alat	404,7	364.234,0	1.000,0	1.150,0	1.350,0	489.835,0	653.606,0	711.694,0
01.BAD.013.052	Akreditasi/ Survailen/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kalibrasi	1,0	Akreditasi	126.000,0	126.000,0	1,0	1,0	1,0	130.000,0	132.000,0	140.000,0
01.BAD.014	Jasa pelayanan teknis kalibrasi industri tekstil	140	Industri		300.000,0	140	140	150	380.000,0	380.000,0	390.000,0
01.BAD.014.051	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi	1.200,0	alat	250,0	300.000,0	1.200,0	1.200,0	1.250,0	380.000,0	380.000,0	390.000,0
01.BAD.015	Jasa pelayanan teknis kalibrasi industri kulit, karet dan plastik	43	Industri		300.000,0	46	50	53	329.992,0	362.990,0	387.300,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.BAD.015.051	Jasa pelayanan teknis kalibrasi	700,0	Alat	318,1	222.700,0	800,0	900,0	950,0	252.692,0	285.690,0	310.000,0
01.BAD.015.052	Akreditasi/ Surveil/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kalibrasi	1,0	Akreditasi	77.300,0	77.300,0	1,0	1,0	1,0	77.300,0	77.300,0	77.300,0
01.BAD.016	Jasa pelayanan teknis kalibrasi industri agro	480	Industri		1.000.000,0	500	520	540	1.100.000,0	1.150.000,0	1.200.000,0
01.BAD.016.051	Layanan Kalibrasi	7.300,0	Alat	137,0	1.000.000,0	7.400,0	7.500,0	7.550,0	1.100.000,0	1.150.000,0	1.200.000,0
01.BAD.017	Jasa pelayanan teknis kalibrasi industri selulosa	40	Industri		178.300,0	45	50	55	178.300,0	178.300,0	178.300,0
01.BAD.017.051	Jasa pelayanan teknis kalibrasi	130.000,0	Alat	1,0	130.000,0	100,0	100,0	100,0	130.000,0	130.000,0	130.000,0
01.BAD.017.052	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kalibrasi	1,0	Sertifikat Akreditasi	48.300,0	48.300,0	1,0	1,0	1,0	48.300,0	48.300,0	48.300,0
01.BAD.018	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim	125	Industri		200.000,0	130	135	140	225.000,0	250.000,0	275.000,0
01.BAD.018.051	Jasa pelayanan teknis kalibrasi	125,0	Industri	1.600,0	200.000,0	130,0	135,0	140,0	225.000,0	250.000,0	275.000,0
01.BAD.019	Jasa pelayanan teknis kalibrasi industri Logam dan Mesin	500	Industri		585.715,0	510	520	530	585.715,0	585.715,0	585.715,0
01.BAD.019.051	Jasa pelayanan teknis kalibrasi	200,0	Alat	2.928,6	585.715,0	200,0	200,0	200,0	585.715,0	585.715,0	585.715,0
01.BAD.020	Jasa pelayanan teknis kalibrasi Industri Keramik dan Mineral Nonlogam	5	Industri		130.000,0	5	5	5	130.000,0	130.000,0	130.000,0
01.BAD.020.051	Jasa pelayanan teknis kalibrasi	20,0	Alat	6.500,0	130.000,0	20,0	20,0	20,0	130.000,0	130.000,0	130.000,0
01.BAD.021	Jasa pelayanan teknis Kalibrasi dan Standardisasi Industri Bahan dan Barang Teknik	1010	Industri		3.500.000,0	1020	1030	1040	3.550.000,0	3.600.000,0	3.650.000,0
01.BAD.021.051	Jasa pelayanan teknis kalibrasi dan standardisasi	1.010,0	Industri	3.465,3	3.500.000,0	1.020,0	1.030,0	1.040,0	3.550.000,0	3.600.000,0	3.650.000,0
01.BAD.022	Jasa pelayanan teknis kalibrasi Pencegahan Pencemaran Industri	30	Industri		336.736,0	30	35	35	339.240,0	356.202,0	374.012,0
01.BAD.022.051	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi	30,0	Industri	9.180,7	275.420,0	30,0	35,0	35,0	277.924,0	294.886,0	312.696,0
01.BAD.022.052	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kalibrasi	1,0	Akreditasi	61.316,0	61.316,0	1,0	1,0	1,0	61.316,0	61.316,0	61.316,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.BAD.023	Jasa pelayanan teknis kalibrasi Industri Kerajinan dan Batik	80	Industri		195.000,0	80	80	80	230.000,0	260.000,0	270.000,0
01.BAD.023.051	Layanan Kalibrasi	670,0	alat	186,6	125.000,0	680,0	690,0	695,0	150.000,0	175.000,0	180.000,0
01.BAD.023.052	Peningkatan dan Optimalisasi Pengelolaan Lembaga Laboratorium Kalibrasi	1,0	Akreditasi	70.000,0	70.000,0	1,0	1,0	1,0	80.000,0	85.000,0	90.000,0
01.BAD.024	Jasa pelayanan teknis kalibrasi	276	Industri		2.220.507,0	303	329	285	2.461.631,0	2.641.190,0	1.825.042,5
01.BAD.024.051	Terselenggaranya jasa pelayanan teknis kalibrasi	41,0	Industri	4.399,7	180.388,0	51,0	61,0	1,0	211.907,0	233.503,0	35.178,0
01.BAD.024.051	Terselenggaranya jasa pelayanan teknis kalibrasi	180,0	Industri	3.633,2	653.967,0	192,0	214,0	226,0	656.833,0	717.516,0	764.767,6
01.BAD.024.051	Terselenggaranya jasa pelayanan teknis kalibrasi	101,0	Industri	7.825,5	790.380,0	117,0	135,0	25,0	915.000,0	960.000,0	490.000,0
01.BAD.024.052	Pengembangan kelembagaan Baristand Industri Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi Lembaga Kalibrasi	7,0	SMM	57.936,3	405.554,0	6,0	6,0	5,0	452.891,0	475.171,0	380.096,9
01.BAD.024.052	Pengembangan kelembagaan Baristand Industri Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi Lembaga Kalibrasi	81,0	SMM	2.348,4	190.218,0	91,0	101,0	1,0	225.000,0	255.000,0	155.000,0
01.BAD.025	Jasa pelayanan teknis sertifikasi industri kimia, farmasi dan kemasan	130	Industri		2.026.697,0	145	165	200	3.045.997,0	4.384.092,0	5.000.000,0
01.BAD.025.051	Layanan Sertifikasi	50,0	Sertifikat	37.933,9	1.896.694,0	55,0	65,0	80,0	2.913.414,0	4.248.581,0	4.850.000,0
01.BAD.025.052	Akreditasi/ Survailen/ Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi/Verifikasi	1,0	Akreditasi	130.003,0	130.003,0	1,0	1,0	1,0	132.583,0	135.511,0	150.000,0
01.BAD.026	Jasa pelayanan teknis sertifikasi industri tekstil	150	Industri		450.000,0	150	150	155	450.000,0	480.000,0	500.000,0
01.BAD.026.051	Jasa pelayanan teknis sertifikasi	165,0	Sertifikat	2.727,3	450.000,0	165,0	165,0	170,0	450.000,0	480.000,0	500.000,0
01.BAD.027	Jasa pelayanan teknis sertifikasi industri kulit, karet dan plastik	147	Industri		1.400.000,0	155	162	170	1.541.047,0	1.804.999,0	2.065.000,0
01.BAD.027.051	Jasa pelayanan teknis sertifikasi	70,0	Sertifikat	16.142,9	1.130.000,0	76,0	80,0	84,0	1.246.047,0	1.484.999,0	1.720.000,0
01.BAD.027.052	Jasa pelayanan sertifikasi profesi	70,0	kegiatan	714,3	50.000,0	70,0	70,0	70,0	55.000,0	60.000,0	65.000,0
01.BAD.027.053	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi	6,0	Akreditasi	31.666,7	190.000,0	6,0	6,0	6,0	210.000,0	230.000,0	250.000,0
01.BAD.027.054	Jasa pelayanan audit teknologi	2,0	Kegiatan	15.000,0	30.000,0	2,0	2,0	2,0	30.000,0	30.000,0	30.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.BAD.028	Jasa pelayanan teknis sertifikasi industri agro	360	Industri		2.100.000,0	380	400	410	2.200.000,0	2.300.000,0	2.400.000,0
01.BAD.028.051	Layanan Sertifikasi	700,0	Sertifikat	3.000,0	2.100.000,0	710,0	720,0	730,0	2.200.000,0	2.300.000,0	2.400.000,0
01.BAD.029	Jasa pelayanan teknis sertifikasi industri selulosa	90	Industri		496.350,0	90	90	90	496.350,0	496.350,0	496.350,0
01.BAD.029.051	Jasa pelayanan teknis sertifikasi	50,0	Sertifikat	7.559,0	377.950,0	55,0	60,0	65,0	377.950,0	377.950,0	377.950,0
01.BAD.029.052	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi	3,0	Sertifikat Akreditasi	39.466,7	118.400,0	3,0	3,0	3,0	118.400,0	118.400,0	118.400,0
01.BAD.030	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim	165	Industri		1.758.000,0	170	175	180	1.965.000,0	2.000.000,0	2.200.000,0
01.BAD.030.051	Jasa pelayanan teknis sertifikasi	165,0	Industri	10.654,5	1.758.000,0	170,0	175,0	180,0	1.965.000,0	2.000.000,0	2.200.000,0
01.BAD.031	Jasa pelayanan teknis sertifikasi industri Logam dan Mesin	35	Industri		508.806,0	37	39	41	508.806,0	508.806,0	508.806,0
01.BAD.031.051	Jasa pelayanan teknis sertifikasi	15,0	Sertifikat	33.920,4	508.806,0	15,0	15,0	20,0	508.806,0	508.806,0	508.806,0
01.BAD.032	Jasa pelayanan teknis sertifikasi Industri Keramik dan Mineral Nonlogam	110	Industri		2.190.000,0	120	120	125	2.200.000,0	2.200.000,0	2.300.000,0
01.BAD.032.051	Jasa pelayanan teknis sertifikasi	210,0	Sertifikat	10.428,6	2.190.000,0	210,0	220,0	220,0	2.200.000,0	2.200.000,0	2.300.000,0
01.BAD.033	Jasa pelayanan teknis sertifikasi industri bahan dan barang teknik	410	Industri		3.700.000,0	420	430	440	3.750.000,0	3.800.000,0	3.850.000,0
01.BAD.033.051	Jasa pelayanan teknis sertifikasi	410,0	Industri	9.024,4	3.700.000,0	420,0	430,0	440,0	3.750.000,0	3.800.000,0	3.850.000,0
01.BAD.034	Jasa pelayanan teknis sertifikasi Pencegahan Pencemaran Industri	240	Industri		977.228,0	250	260	270	1.074.950,0	1.182.445,0	1.300.690,0
01.BAD.034.051	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi	240,0	Industri	2.977,9	714.700,0	250,0	260,0	270,0	812.422,0	919.917,0	1.038.162,0
01.BAD.034.052	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Lembaga Sertifikasi	1,0	Akreditasi	262.528,0	262.528,0	1,0	1,0	1,0	262.528,0	262.528,0	262.528,0
01.BAD.035	Jasa pelayanan teknis sertifikasi Industri Kerajinan dan Batik	100	Industri		505.000,0	100	100	100	535.000,0	590.000,0	645.000,0
01.BAD.035.051	Jasa pelayanan teknis sertifikasi	165,0	Sertifikat	2.272,7	375.000,0	170,0	175,0	180,0	400.000,0	450.000,0	500.000,0
01.BAD.035.052	Peningkatan dan Optimalisasi Pengelolaan Lembaga Sertifikasi	4,0	Akreditasi	17.500,0	70.000,0	4,0	4,0	4,0	75.000,0	80.000,0	85.000,0
01.BAD.035.053	Peningkatan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)	1,0	Akreditasi	60.000,0	60.000,0	1,0	1,0	1,0	60.000,0	60.000,0	60.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.BAD.036	Jasa pelayanan teknis sertifikasi	1074	Industri		14.867.735,0	1050	1127	724	15.921.330,0	16.813.050,0	10.325.313,3
01.BAD.036.051	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi	61,0	Industri	8.817,6	537.875,0	16,0	21,0	1,0	531.421,0	632.992,0	34.642,0
01.BAD.036.051	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi	375,0	Industri	5.258,0	1.971.746,0	411,0	428,0	225,0	2.195.495,0	2.280.045,0	2.450.549,5
01.BAD.036.051	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi	720,0	Industri	13.080,6	9.418.000,0	775,0	825,0	855,0	9.923.000,0	10.430.000,0	4.335.000,0
01.BAD.036.052	Pengembangan kelembagaan Baristand Industri Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi Lembaga Sertifikasi Produk	1,0	SMM	70.594,0	70.594,0	1,0	1,0	1,0	74.124,0	77.830,0	81.721,0
01.BAD.036.052	Pengembangan kelembagaan Baristand Industri Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi Lembaga Sertifikasi Produk	15,0	SMM	65.933,0	988.995,0	15,0	16,0	9,0	1.097.273,0	972.166,0	1.058.383,8
01.BAD.036.052	Pengembangan kelembagaan Baristand Industri Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi Lembaga Sertifikasi Produk	13,0	SMM	144.655,8	1.880.525,0	13,0	13,0	13,0	2.100.017,0	2.420.017,0	2.365.017,0
01.BAD.038	Jasa Pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri Logam dan Mesin	15	Industri		315.946,0	16	17	18	315.946,0	315.946,0	315.946,0
01.BAD.038.051	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis	5,0	Sertifikat	63.189,2	315.946,0	5,0	5,0	7,0	315.946,0	315.946,0	315.946,0
01.BAD.039	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri kulit, karet dan plastik	23	Industri		200.000,0	26	30	32	219.974,0	241.971,0	270.000,0
01.BAD.039.051	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri	30,0	kegiatan	6.666,7	200.000,0	32,0	34,0	36,0	219.974,0	241.971,0	270.000,0
01.BAD.040	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri agro	60	Industri		700.000,0	65	70	75	750.000,0	800.000,0	850.000,0
01.BAD.040.051	Layanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri Agro	1.200,0	Orang	583,3	700.000,0	1.250,0	1.300,0	1.350,0	750.000,0	800.000,0	850.000,0
01.BAD.042	Jasa pelayanan inspeksi teknik industri agro	35	Industri		500.000,0	40	45	50	550.000,0	575.000,0	600.000,0
01.BAD.042.051	Layanan inspeksi teknis	180,0	Titik proses	2.777,8	500.000,0	190,0	200,0	210,0	550.000,0	575.000,0	600.000,0
01.BAD.043	Jasa pelayanan inspeksi teknik industri Logam dan Mesin	1	Industri		200.000,0	1	1	1	200.000,0	200.000,0	200.000,0
01.BAD.043.051	Jasa pelayanan inspeksi teknik	1,0	Industri	200.000,0	200.000,0	1,0	1,0	1,0	200.000,0	200.000,0	200.000,0
01.BAD.044	Jasa pelayanan konsultasi teknis/manajemen industri kulit, karet dan plastik	5	Industri		100.000,0	6	6	7	109.928,0	120.920,0	135.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.BAD.044.051	Jasa pelayanan konsultasi teknis/manajemen	3,0	Konsultasi	25.000,0	75.000,0	4,0	4,0	4,0	79.928,0	90.920,0	100.000,0
01.BAD.044.052	Jasa pelayanan pendampingan dan assesmen INDI 4.0	2,0	kegiatan	12.500,0	25.000,0	2,0	2,0	3,0	30.000,0	30.000,0	35.000,0
01.BAD.045	Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri agro	3	Industri		200.000,0	4	4	4	200.000,0	220.000,0	250.000,0
01.BAD.045.051	Layanan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri agro	3,0	industri	66.666,7	200.000,0	4,0	4,0	4,0	200.000,0	220.000,0	250.000,0
01.BAD.046	Jasa Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri Logam dan Mesin	30	Industri		637.858,0	31	32	33	637.858,0	637.858,0	637.858,0
01.BAD.046.051	Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri Logam dan Mesin	20,0	SPK	31.892,9	637.858,0	20,0	20,0	20,0	637.858,0	637.858,0	637.858,0
01.BAD.048	Jasa pelayanan teknis konsultasi teknis/manajemen industri agro	8	Industri		100.000,0	8	8	9	110.000,0	120.000,0	130.000,0
01.BAD.048.051	Layanan konsultasi	8,0	Kontrak	12.500,0	100.000,0	8,0	8,0	9,0	110.000,0	120.000,0	130.000,0
01.BAD.050	Jasa penelitian dan pengembangan BBIA		Industri		0,0				0,0	0,0	0,0
01.BAD.052	Jasa penyelenggaraan uji profisiensi industri agro	11	Industri		600.000,0	12	13	13	600.000,0	650.000,0	650.000,0
01.BAD.052.051	Layanan penyelenggaraan uji profisiensi	11,0	Komoditi	54.545,5	600.000,0	12,0	13,0	13,0	600.000,0	650.000,0	650.000,0
01.BAD.053	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri bahan dan barang teknik	400	Industri		3.300.000,0	425	450	460	3.350.000,0	3.400.000,0	3.450.000,0
01.BAD.053.051	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri	400,0	Industri	8.250,0	3.300.000,0	425,0	450,0	460,0	3.350.000,0	3.400.000,0	3.450.000,0
01.BAD.054	Jasa pelayanan inspeksi teknik Industri bahan dan barang teknik	600	Industri		2.500.000,0	650	700	750	2.550.000,0	2.600.000,0	2.650.000,0
01.BAD.054.051	Jasa pelayanan inspeksi teknik	600,0	Industri	4.166,7	2.500.000,0	650,0	700,0	750,0	2.550.000,0	2.600.000,0	2.650.000,0
01.BAD.055	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri Pencegahan Pencemaran Industri	5	Industri		217.110,0	5	7	7	225.795,0	234.827,0	244.220,0
01.BAD.055.051	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri	5,0	industri	43.422,0	217.110,0	5,0	7,0	7,0	225.795,0	234.827,0	244.220,0
01.BAD.056	Jasa pelayanan inspeksi teknis dan verifikasi industri Pencegahan Pencemaran Industri	10	Industri		28.668,0	17	18	23	57.336,0	86.004,0	90.305,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.BAD.056.051	Pelayanan Inspeksi Teknis dan Verifikasi Industri	10,0	Industri	2.866,8	28.668,0	17,0	18,0	23,0	57.336,0	86.004,0	90.305,0
01.BAD.057	Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri Pencegahan Pencemaran Industri	8	Industri		477.182,0	8	8	8	500.792,0	525.582,0	551.612,0
01.BAD.057.051	Layanan Konsultansi dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	7,0	Industri	54.554,3	381.880,0	7,0	7,0	7,0	400.000,0	425.000,0	450.000,0
01.BAD.057.052	Kolaborasi Pemanfaatan dan Penerapan Teknologi Industri	1,0	Industri	95.302,0	95.302,0	1,0	1,0	1,0	100.792,0	100.582,0	101.612,0
01.BAD.058	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri	181	Industri		1.610.306,0	225	256	202	1.766.499,0	1.994.623,0	1.703.859,3
01.BAD.058.051	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri	118,0	Industri	6.363,0	750.834,0	140,0	153,0	74,0	856.499,0	909.623,0	803.559,3
01.BAD.058.051	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri	45,0	Industri	19.099,4	859.472,0	66,0	86,0	105,0	910.000,0	1.085.000,0	900.300,0
01.BAD.059	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim	155	Industri		350.000,0	160	165	170	375.000,0	400.000,0	425.000,0
01.BAD.059.051	Layanan Jasa Bimbingan dan Pendampingan Teknis	155,0	Industri	2.258,1	350.000,0	160,0	165,0	170,0	375.000,0	400.000,0	425.000,0
01.BAD.059.052	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM Pelayanan	0,0	Orang	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BAD.060	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri selulosa	5	Industri		101.800,0	5	5	5	101.800,0	101.800,0	101.800,0
01.BAD.060.051	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri	5,0	Industri	20.360,0	101.800,0	5,0	5,0	5,0	101.800,0	101.800,0	101.800,0
01.BAD.061	Jasa pelayanan konsultansi teknis/manajemen industri selulosa	10	Industri		636.750,0	12	14	16	660.000,0	670.000,0	680.000,0
01.BAD.061.051	Jasa pelayanan teknis konsultasi	12,0	Konsultasi	53.062,5	636.750,0	14,0	16,0	18,0	660.000,0	670.000,0	680.000,0
01.BAD.062	Jasa penelitian dan pengembangan BBPK	0	Industri		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.BAD.062.051	Layanan kerjasama penelitian dan pengembangan	0,0	Kontrak kerjasama	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BAD.064	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri Industri Keramik dan Mineral Nonlogam	25	Industri		450.000,0	30	35	35	450.000,0	500.000,0	500.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.BAD.064.051	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri	12,0	Kegiatan pelatihan	37.500,0	450.000,0	12,0	12,0	12,0	450.000,0	500.000,0	500.000,0
01.BAD.065	Jasa pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri Kerajinan dan Batik	30	Industri		750.000,0	35	35	40	850.000,0	950.000,0	1.000.000,0
01.BAD.065.051	Jasa pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri	500,0	Orang	1.500,0	750.000,0	500,0	500,0	500,0	850.000,0	950.000,0	1.000.000,0
01.BAD.066	Jasa pelayanan konsultasi teknis/manajemen Industri Keramik dan Mineral Nonlogam	4	Industri		195.000,0	4	5	5	205.000,0	230.000,0	240.000,0
01.BAD.066.051	Jasa pelayanan teknis konsultasi	3,0	Konsultasi	20.000,0	60.000,0	3,0	4,0	4,0	60.000,0	70.000,0	80.000,0
01.BAD.066.052	Standar SNI Wajib dan Usulan SNI	5,0	Jumlah Standar	11.000,0	55.000,0	6,0	6,0	7,0	55.000,0	60.000,0	60.000,0
01.BAD.066.053	Konsultasi Pendampingan Industri 4.0	1,0	Konsultasi	80.000,0	80.000,0	1,0	1,0	1,0	90.000,0	100.000,0	100.000,0
01.BAD.067	Jasa pelayanan teknis konsultasi Teknis/Manajemen Industri Kerajinan dan Batik	3	Industri		75.000,0	3	3	3	100.000,0	125.000,0	150.000,0
01.BAD.067.051	Jasa pelayanan teknis konsultasi Teknis/Manajemen Industri	3,0	Industri	25.000,0	75.000,0	3,0	3,0	3,0	100.000,0	125.000,0	150.000,0
01.BAD.068	Jasa penelitian dan pengembangan BBKB		Industri		0,0				0,0	0,0	0,0
01.BAD.069	Jasa pemanfaatan teknologi BBK		Industri		0,0				0,0	0,0	0,0
01.BAD.070	Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri Industri Keramik dan Mineral Nonlogam	4	Industri		500.000,0	4	5	5	550.000,0	550.000,0	630.000,0
01.BAD.070.051	Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri	3,0	Layanan optimalisasi	116.666,7	350.000,0	3,0	4,0	4,0	400.000,0	400.000,0	450.000,0
01.BAD.070.052	Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri 4.0	1,0	Layanan optimalisasi	150.000,0	150.000,0	1,0	1,0	1,0	150.000,0	150.000,0	180.000,0
01.BAD.071	Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri Kerajinan dan Batik	2	Industri		80.000,0	2	2	2	80.000,0	80.000,0	80.000,0
01.BAD.071.051	Jasa pemanfaatan teknologi industri Kerajinan dan Batik	2,0	Industri	40.000,0	80.000,0	2,0	2,0	2,0	80.000,0	80.000,0	80.000,0
01.BAD.072	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri kimia, farmasi dan kemasan		Industri		0,0				0,0	0,0	0,0
01.BAD.073	Jasa pelayanan konsultasi teknis/manajemen industri kimia, farmasi dan kemasan	10	Industri		329.719,0	12	15	20	477.221,0	670.429,0	724.063,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.BAD.073.051	Layanan Pendampingan dan Konsultasi	10,0	Konsultasi	32.971,9	329.719,0	12,0	15,0	20,0	477.221,0	670.429,0	724.063,0
01.BAD.074	Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri kimia, farmasi dan kemasan	1	Industri		88.025,0	1	1	2	128.134,0	181.173,0	235.666,0
01.BAD.074.051	Layanan Kerja sama Pemanfaatan Teknologi	1,0	Kerja sama Pemanfaatan Teknologi	88.025,0	88.025,0	1,0	1,0	2,0	128.134,0	181.173,0	235.666,0
01.BAD.075	Jasa Pelayanan Pemeriksa dan Pengujian Produk Halal	82	Industri		1.014.196,0	103	118	78	1.209.003,0	1.349.330,0	1.095.574,9
01.BAD.075.051	Penyelenggaraan Lembaga Pemeriksa Halal	21,0	Industri	6.397,9	134.355,0	26,0	31,0	1,0	186.073,0	237.876,0	39.770,0
01.BAD.075.051	Penyelenggaraan Lembaga Pemeriksa Halal	38,0	Industri	9.807,4	372.682,0	49,0	54,0	35,0	426.252,0	408.745,0	457.261,4
01.BAD.075.051	Penyelenggaraan Lembaga Pemeriksa Halal	4,0	Industri	47.551,0	190.204,0	5,0	6,0	1,0	220.000,0	298.000,0	225.000,0
01.BAD.075.052	Pengembangan Kelembagaan Jaminan Produk Halal	5,0	dokumen	39.547,8	197.739,0	5,0	4,0	3,0	231.678,0	209.709,0	228.543,5
01.BAD.075.052	Pengembangan Kelembagaan Jaminan Produk Halal	2,0	dokumen	59.608,0	119.216,0	2,0	2,0	1,0	145.000,0	195.000,0	145.000,0
01.BAD.076	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri tekstil	15	Industri		80.000,0	15	15	15	80.000,0	80.000,0	80.000,0
01.BAD.076.051	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis	6,0	Kegiatan	13.333,3	80.000,0	6,0	6,0	6,0	80.000,0	80.000,0	80.000,0
01.BAD.077	Jasa pelayanan konsultasi teknis/manajemen industri tekstil	9	Industri		150.000,0	9	9	10	250.000,0	250.000,0	280.000,0
01.BAD.077.051	Jasa pelayanan konsultasi teknis/manajemen	9,0	kegiatan	16.666,7	150.000,0	9,0	9,0	10,0	250.000,0	250.000,0	280.000,0
01.BAD.078	Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri tekstil	1	Industri		70.000,0	1	2	2	100.000,0	150.000,0	150.000,0
01.BAD.078.051	Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi	1,0	Kegiatan	70.000,0	70.000,0	1,0	2,0	2,0	100.000,0	150.000,0	150.000,0
01.BAD.080	Jasa Pelayanan Inspeksi Teknik Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim	15	Industri		350.000,0	20	25	30	375.000,0	400.000,0	425.000,0
01.BAD.080.051	Jasa Pelayanan Verifikasi dan Inspeksi Teknis	15,0	Industri	23.333,3	350.000,0	20,0	25,0	30,0	375.000,0	400.000,0	425.000,0
01.BAD.082	Jasa pelayanan konsultasi teknis/manajemen industri bahan dan barang teknik	2	Industri		500.000,0	2	2	2	600.000,0	700.000,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.BAD.082.051	Jasa pelayanan konsultasi teknis/manajemen	2,0	Industri	250.000,0	500.000,0	2,0	2,0	0,0	600.000,0	700.000,0	0,0
01.BAD.083	Jasa pelayanan inspeksi teknik	5	Industri		50.000,0	5	5	5	50.000,0	50.000,0	50.000,0
01.BAD.083.051	Manajemen Lembaga Inspeksi sesuai SNI ISO/IEC 17020:2012	5,0	Industri	10.000,0	50.000,0	5,0	5,0	5,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0
01.BAD.084	Jasa penyelenggaraan uji profisiensi industri Logam dan Mesin	1	Industri		76.710,0	1	1	1	76.710,0	76.710,0	76.710,0
01.BAD.084.084	Layanan penyelenggaraan uji profisiensi	1,0	Komoditi	76.710,0	76.710,0	1,0	1,0	1,0	76.710,0	76.710,0	76.710,0
01.BAD.085	Jasa pelayanan inspeksi teknis industri kulit, karet dan plastik	13	Industri		215.000,0	20	28	35	285.000,0	308.000,0	335.000,0
01.BAD.085.051	Jasa pelayanan inspeksi teknis	6,0	Kegiatan	8.333,3	50.000,0	10,0	15,0	19,0	65.000,0	80.000,0	95.000,0
01.BAD.085.052	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Inspeksi Teknis	1,0	Akreditasi	50.000,0	50.000,0	1,0	1,0	1,0	50.000,0	55.000,0	60.000,0
01.BAD.085.053	Jasa pelayanan validasi dan verifikasi gas rumah kaca	7,0	kegiatan	7.142,9	50.000,0	10,0	13,0	16,0	65.000,0	68.000,0	75.000,0
01.BAD.085.054	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Validasi dan Verifikasi gas rumah kaca	1,0	Akreditasi	50.000,0	50.000,0	1,0	1,0	1,0	75.000,0	75.000,0	75.000,0
01.BAD.085.055	Jasa pelayanan verifikasi TKDN	3,0	kegiatan	5.000,0	15.000,0	5,0	7,0	9,0	30.000,0	30.000,0	30.000,0
01.BAD.088	Jasa Penyelenggaraan Uji Profisiensi Industri Kulit, Karet dan Plastik	14	Industri		80.000,0	16	18	20	90.000,0	95.000,0	100.000,0
01.BAD.088.051	Jasa Pelayanan Uji Profisiensi	14,0	layanan	3.571,4	50.000,0	16,0	18,0	20,0	55.000,0	60.000,0	65.000,0
01.BAD.088.052	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Uji Profisiensi	1,0	akreditasi	30.000,0	30.000,0	1,0	1,0	1,0	35.000,0	35.000,0	35.000,0
01.BAD.089	Jasa pelayanan pemeriksa dan pengujian produk halal industri kulit, karet dan plastik	4	Industri		300.000,0	5	5	6	350.000,0	370.000,0	390.000,0
01.BAD.089.051	Layanan pemeriksa dan pengujian produk halal	4,0	Industri	65.000,0	260.000,0	5,0	5,0	6,0	310.000,0	330.000,0	350.000,0
01.BAD.089.052	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Pemeriksa Halal	1,0	Akreditasi	40.000,0	40.000,0	1,0	1,0	1,0	40.000,0	40.000,0	40.000,0
01.BAD.093	Jasa Pelayanan Proses dan Mesin Industri Kulit, Karet dan Plastik	3	Industri		69.650,0	3	3	3	77.000,0	84.700,0	95.000,0
01.BAD.093.051	Miniplant Karet	2,0	kegiatan	15.000,0	30.000,0	2,0	2,0	2,0	35.000,0	40.000,0	45.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.BAD.093.052	Miniplant Kulit	2,0	kegiatan	19.825,0	39.650,0	2,0	2,0	2,0	42.000,0	44.700,0	50.000,0
01.BAD.094	Jasa Pelayanan Inspeksi Teknik Industri Tekstil	10	Industri		75.000,0	10	10	10	150.000,0	150.000,0	150.000,0
01.BAD.094.051	Layanan Jasa inspeksi teknik	10,0	sertifikat	7.500,0	75.000,0	10,0	10,0	10,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0
01.BAD.095	Jasa pelayanan konsultansi teknis/manajemen industri		Industri		0,0				0,0	0,0	0,0
01.BAD.096	Jasa Pelayanan Teknis Uji Profisiensi Pencegahan Pencemaran Industri	15	Industri		255.668,0	15	15	15	235.668,0	243.668,0	243.668,0
01.BAD.096.051	Jasa Pelayanan Teknis Uji Profisiensi	15,0	Industri	14.133,3	212.000,0	15,0	15,0	15,0	192.000,0	200.000,0	200.000,0
01.BAD.096.052	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Penyelenggara Uji Profisiensi	1,0	Akreditasi	43.668,0	43.668,0	1,0	1,0	1,0	43.668,0	43.668,0	43.668,0
01.BAD.097	Jasa Pelayanan Konsultansi Teknis/Manajemen Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim		Industri		0,0				0,0	0,0	0,0
01.BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri		Industri/ IKM/ Miliar USD		2.670.279,0				2.900.125,0	2.907.438,0	2.539.181,8
01.BDI.004	Verifikasi dan pembinaan usaha Jasa Industri Pusat OPTIKJI	0	Industri		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.BDI.004.051	Verifikasi dan pembinaan usaha Jasa Industri	0,0	Perusahaan	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BDI.006	Pemanfaatan Teknologi Industri	48	Industri		2.420.279,0	49	54	47	2.650.125,0	2.657.438,0	2.289.181,8
01.BDI.006.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	5,0	Industri	30.000,0	150.000,0	5,0	5,0	5,0	160.000,0	170.000,0	170.000,0
01.BDI.006.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	5,0	Industri	10.000,0	50.000,0	5,0	5,0	5,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0
01.BDI.006.051	Paket teknologi/supervisi/konsultasi yang dimanfaatkan oleh industri	1,0	Industri	50.000,0	50.000,0	1,0	1,0	1,0	25.000,0	25.000,0	50.000,0
01.BDI.006.051	Paket teknologi/supervisi/konsultasi yang dimanfaatkan oleh industri	18,0	Industri	42.688,0	768.384,0	18,0	17,0	15,0	933.125,0	817.438,0	579.181,8
01.BDI.006.051	Paket teknologi/supervisi/konsultasi yang dimanfaatkan oleh industri	10,0	Industri	95.589,5	955.895,0	12,0	13,0	13,0	987.000,0	1.030.000,0	1.075.000,0
01.BDI.006.052	Penerapan Pemanfaatan Teknologi Oleh BSPJI	11,0	Industri	18.181,8	200.000,0	11,0	11,0	1,0	225.000,0	275.000,0	50.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.BDI.006.052	Penerapan Pemanfaatan Teknologi Oleh BSPJI	1,0	Industri	196.000,0	196.000,0	1,0	1,0	1,0	220.000,0	240.000,0	265.000,0
01.BDI.006.052	Penerapan Pemanfaatan Teknologi Oleh BSPJI	1,0	Industri	50.000,0	50.000,0	1,0	1,0	0,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0
01.BDI.008	Pemanfaatan Teknologi Industri Kerajinan dan Batik	5	Industri		250.000,0	5	5	5	250.000,0	250.000,0	250.000,0
01.BDI.008.051	Pemanfaatan Teknologi Industri Kerajinan dan Batik	5,0	Industri	50.000,0	250.000,0	5,0	5,0	5,0	250.000,0	250.000,0	250.000,0
01.BDI.011	Pemanfaatan Teknologi Industri Tekstil	0	IKM		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.BDI.011.051	Pemanfaatan Teknologi Industri Tekstil	0,0	IKM	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BDI.014	Pemanfaatan Teknologi Industri Kimia, Farmasi dan Kemasan	0	Industri		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.BDI.014.051	Pemanfaatan Teknologi Industri Kimia, Farmasi dan Kemasan	0,0	Industri	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan		Unit		116.164.590,0				82.438.225,0	74.947.372,0	72.216.036,5
01.CAH.003	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan Industri Keramik dan Mineral Nonlogam	20	Unit		1.100.000,0	20	23	23	1.500.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0
01.CAH.003.051	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan BBSPJIKMN	20,0	Unit	55.000,0	1.100.000,0	20,0	23,0	23,0	1.500.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0
01.CAH.004	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan industri kimia, farmasi dan kemasan	12	Unit		2.107.742,0	13	14	15	2.258.691,0	2.367.512,0	2.604.263,0
01.CAH.004.051	Pengadaan fasilitas layanan	12,0	Unit	175.645,2	2.107.742,0	13,0	14,0	15,0	2.258.691,0	2.367.512,0	2.604.263,0
01.CAH.005	Perangkat pengolah data dan komunikasi laboratorium/workshop/layanan industri kulit, karet dan plastik	0	Unit		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.CAH.005.051	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	0,0	Unit	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.CAH.006	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan industri kulit, karet dan plastik	3	Unit		500.000,0	3	3	3	525.000,0	550.000,0	600.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.CAH.006.051	Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan	3,0	Unit	166.666,7	500.000,0	3,0	3,0	3,0	525.000,0	550.000,0	600.000,0
01.CAH.007	Kendaraan bermotor roda 4/ roda 2 operasional layanan industri kulit, karet dan plastik	0	Unit		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.CAH.007.051	Pengadaan kendaraan bermotor roda 4/ roda 2 operasional layanan	0,0	Unit	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.CAH.008	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan industri tekstil	8	Unit		800.000,0	12	12	12	1.200.000,0	1.200.000,0	1.200.000,0
01.CAH.008.051	Peralatan Fasilitas Laboratorium/Workshop/Layanan	8,0	unit	100.000,0	800.000,0	12,0	12,0	12,0	1.200.000,0	1.200.000,0	1.200.000,0
01.CAH.009	Kendaraan bermotor roda 4/ roda 2 operasional layanan Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim	0	Unit		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.CAH.009.051	Pengadaan Kendaraan Bermotor roda 4/roda 2 Operasional	0,0	Unit	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.CAH.010	Peralatan fasilitas laboratorium/ workshop/ layanan Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim	5	Unit		3.550.000,0	4	3	0	2.750.000,0	2.250.000,0	0,0
01.CAH.010.051	Peralatan Laboratorium Pengujian	5,0	Unit	710.000,0	3.550.000,0	4,0	3,0	0,0	2.750.000,0	2.250.000,0	0,0
01.CAH.011	Peralatan fasilitas laboratorium/ workshop/ layanan industri bahan dan barang teknik	3	Unit		19.670.000,0	2	2	2	4.000.000,0	4.000.000,0	0,0
01.CAH.011.051	Peralatan fasilitas laboratorium/ workshop/ layanan	2,0	Unit	9.835.000,0	19.670.000,0	2,0	2,0	0,0	4.000.000,0	4.000.000,0	0,0
01.CAH.012	Perangkat pengolah data dan komunikasi laboratorium/ workshop/ layanan Pencegahan Pencemaran Industri	0	Unit		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.CAH.012.051	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi laboratorium/workshop/layanan	0,0	Unit	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.CAH.013	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan Pencegahan Pencemaran Industri	17	Unit		10.003.710,0	10	1	1	3.892.011,0	505.705,0	1.000.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.CAH.013.051	Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan	2,0	Unit	2.846.655,0	5.693.310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.CAH.013.051	Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan	15,0	Unit	287.360,0	4.310.400,0	10,0	1,0	1,0	3.892.011,0	505.705,0	1.000.000,0
01.CAH.015	Kendaraan bermotor roda 4/ roda 2 operasional layanan	0	Unit		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.CAH.015.051	Tersedianya Kendaraan Roda 4/roda 2 untuk pelayanan jasa	0,0	Unit	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.CAH.015.051	Tersedianya Kendaraan Roda 4/roda 2 untuk pelayanan jasa	0,0	Unit	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.CAH.016	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan industri agro	5	Unit		3.000.000,0	7	8	9	6.000.000,0	7.000.000,0	8.000.000,0
01.CAH.016.051	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan BBIA	2,0	Unit	500.000,0	1.000.000,0	4,0	5,0	6,0	4.000.000,0	5.000.000,0	6.000.000,0
01.CAH.016.051	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan BBIA	3,0	Unit	666.666,7	2.000.000,0	3,0	3,0	3,0	2.000.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0
01.CAH.021	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan	93	Unit		62.882.337,0	99	111	96	52.722.523,0	52.984.155,0	54.701.773,5
01.CAH.021.051	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan	19,0	Unit / Paket	2.601.353,3	49.425.713,0	24,0	30,0	28,0	36.457.663,0	37.568.546,0	38.260.000,0
01.CAH.021.051	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan	50,0	Unit / Paket	64.463,1	3.223.155,0	65,0	71,0	81,0	5.911.396,0	4.861.645,0	5.487.809,5
01.CAH.021.051	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan	19,0	Unit / Paket	538.603,6	10.233.469,0	24,0	25,0	25,0	10.353.464,0	10.553.964,0	10.953.964,0
01.CAH.022	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan Industri selulosa	7	Unit		550.801,0	9	11	13	590.000,0	590.000,0	610.000,0
01.CAH.022.051	Peralatan Fasilitas Laboratorium/Workshop/Layanan	4,0	Unit	79.472,5	317.890,0	5,0	6,0	7,0	350.000,0	350.000,0	370.000,0
01.CAH.022.051	Peralatan Fasilitas Laboratorium/Workshop/Layanan	3,0	Unit	77.637,0	232.911,0	4,0	5,0	6,0	240.000,0	240.000,0	240.000,0
01.CAH.023	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan industri Logam dan Mesin	5	Unit		2.000.000,0	5	5	5	2.000.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.CAH.023.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	5,0	Unit	200.000,0	1.000.000,0	5,0	5,0	5,0	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
01.CAH.023.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	5,0	Unit	200.000,0	1.000.000,0	5,0	5,0	5,0	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
01.CAH.024	Kendaraan bermotor roda 4/ roda 2 operasional layanan industri Logam dan Mesin	0	Unit		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.CAH.024.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	0,0	Unit	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.CAH.026	Peningkatan fasilitas pengembangan industri benefisiari mineral non logam	5	Unit		10.000.000,0	5	5	5	5.000.000,0	0,0	0,0
01.CAH.026.051	Peralatan pengembangan industri benefisiari mineral non logam	5,0	Unit	2.000.000,0	10.000.000,0	5,0	0,0	0,0	5.000.000,0	0,0	0,0
01.CBL	Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan		unit/ Ruas		7.386.589,0				3.417.500,0	6.708.500,0	797.500,0
01.CBL.002	Gedung laboratorium/workshop/layanan yang dibangun/direnovasi Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim	1	unit		2.000.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.CBL.002.051	Pengembangan Gedung Laboratorium	1,0	Unit	2.000.000,0	2.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.CBL.002.052	Revitalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah	0,0	Unit	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.CBL.003	Gedung laboratorium/layanan jasa teknis yang dibangun/direnovasi Industri Tekstil	1	unit		850.000,0	1	1	0	950.000,0	950.000,0	0,0
01.CBL.003.051	Renovasi/pembangunan gedung laboratorium/layanan	1,0	unit	850.000,0	850.000,0	1,0	1,0	0,0	950.000,0	950.000,0	0,0
01.CBL.004	Gedung laboratorium/workshop/layanan yang dibangun/direnovasi	5	unit		3.225.500,0	4	4	3	1.147.500,0	4.398.500,0	397.500,0
01.CBL.004.051	Gedung laboratorium/workshop/layanan yang dibangun/direnovasi	3,0	Unit	942.333,3	2.827.000,0	2,0	2,0	1,0	699.000,0	4.200.000,0	199.000,0
01.CBL.004.051	Gedung laboratorium/workshop/layanan yang dibangun/direnovasi	0,0	Unit	Infinity	200.000,0	0,0	0,0	0,0	250.000,0	0,0	0,0
01.CBL.004.051	Gedung laboratorium/workshop/layanan yang dibangun/direnovasi	1,0	Unit	198.500,0	198.500,0	1,0	1,0	1,0	198.500,0	198.500,0	198.500,0
01.CBL.005	Gedung laboratorium/layanan jasa teknis yang dibangun/direnovasi Industri Keramik dan Mineral Nonlogam	0	unit		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0





KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
02.BDI.007	Pemanfaatan Teknologi Industri industri logam dan mesin	2	Industri		211.119,0	2	2	2	211.119,0	211.119,0	211.119,0
02.BDI.007.051	Pendampingan dan Supervisi untuk optimalisasi implementasi 4.0 pada Industri Logam dan Mesin	1,0	Industri	100.000,0	100.000,0	1,0	1,0	1,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0
02.BDI.007.051	Pendampingan dan Supervisi untuk optimalisasi implementasi 4.0 pada Industri Logam dan Mesin	1,0	Industri	16.887,0	16.887,0	1,0	1,0	1,0	16.887,0	16.887,0	16.887,0
02.BDI.007.052	Optimalisasi teknologi industri logam dan mesin	1,0	Industri	69.751,0	69.751,0	1,0	1,0	1,0	69.751,0	69.751,0	69.751,0
02.BDI.007.052	Optimalisasi teknologi industri logam dan mesin	1,0	Industri	24.481,0	24.481,0	1,0	1,0	1,0	24.481,0	24.481,0	24.481,0
02.BDI.012	Pemanfaatan Teknologi Industri industri agro	1	Industri		50.000,0	1	0	0	50.000,0	0,0	0,0
02.BDI.012.051	Pemanfaatan teknologi industri agro	1,0	Industri	50.000,0	50.000,0	1,0	0,0	0,0	50.000,0	0,0	0,0
02.BDI.013	Pemanfaatan Teknologi Industri selulosa	1	Industri		60.000,0	1	1	0	70.000,0	80.000,0	0,0
02.BDI.013.051	Pemanfaatan Teknologi Industri Selulosa	1,0	Industri	60.000,0	60.000,0	1,0	1,0	0,0	70.000,0	80.000,0	0,0
02.PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM		Rekomendasi Kebijakan/ Kajian		0,0				0,0	0,0	0,0
02.PBK.002	Perumusan Kebijakan Untuk Mendukung Implementasi Making Indonesia 4.0	0	Rekomendasi Kebijakan		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
02.PBK.002.051	Kebijakan Teknis Penguatan Ekosistem industri 4.0	0,0	Rekomendasi Kebijakan	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		Lembaga/ Unit Kerja/ Tim		0,0				0,0	0,0	0,0
02.QDB.001	Pembentukan Smart Factory Model	0	Unit Kerja		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
02.QDB.001.051	Smart Factory Model di Balai Besar	0,0	Unit Kerja	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri		Industri/ IKM/ Miliar USD		36.000.000,0				43.500.000,0	45.000.000,0	47.500.000,0
02.QDI.001	Penguatan Industri melalui Optimalisasi Teknologi	70	Industri		26.000.000,0	85	95	100	33.500.000,0	35.000.000,0	37.500.000,0
02.QDI.001.051	Penguatan Industri melalui Optimalisasi Teknologi	20,0	Industri	500.000,0	10.000.000,0	30,0	35,0	45,0	15.000.000,0	15.000.000,0	16.000.000,0



KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
03.ABK.003	Penyusunan Regulasi Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri Pusat OPTIKJI	0	Rekomendasi Kebijakan		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
03.ABK.003.051	Penyusunan Kebijakan Teknis Pemilihan Pemanfaatan Teknologi Industri	0,0	Rekomendasi	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.ABK.003.052	Penyusunan Kebijakan Teknis Penjaminan Resiko Pemanfaatan Teknologi Industri	0,0	Rekomendasi	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.ABK.003.053	Penyusunan Kebijakan Teknis Pengendalian Pemanfaatan Teknologi Industri melalui Audit Teknologi Industri	0,0	Rekomendasi	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.ABK.003.054	Penyusunan Kebijakan Teknis Standar Spesifikasi Teknologi Industri	0,0	Rekomendasi	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.ABK.003.055	Penyusunan Pedoman Pemberian Penghargaan Bidang Teknologi Industri	0,0	Rekomendasi	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.ABK.004	Kajian Ilmiah Pemanfaatan Teknologi Industri Pusat OPTIKJI	0	Rekomendasi Kebijakan		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
03.ABK.004.051	Perencanaan, perumusan dan pemantauan kebijakan jasa industri	0,0	Rekomendasi	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		NSPK/ Rancangan Standar/ Pedoman/ Standar		0,0				0,0	0,0	0,0
03.AFA.001	NSPK Jasa Industri Pusat OPTIKJI	0	NSPK		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
03.AFA.001.051	Penyusunan NSPK Jasa Industri	0,0	NSPK	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri		Industri/ IKM/ Miliar USD		1.100.000,0				1.143.000,0	1.160.000,0	330.000,0
03.BDI.003	Pemanfaatan Teknologi Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim	8	Industri		600.000,0	8	9	0	620.000,0	635.000,0	0,0
03.BDI.003.051	Pendampingan Peningkatan Teknologi	5,0	Industri	61.000,0	305.000,0	5,0	6,0	0,0	315.000,0	320.000,0	0,0
03.BDI.003.052	Konsultasi Industri	3,0	Industri	98.333,3	295.000,0	3,0	3,0	0,0	305.000,0	315.000,0	0,0
03.BDI.005	Pemanfaatan Teknologi Industri Kulit, Karet dan Plastik	1	Industri		70.000,0	1	1	1	73.000,0	75.000,0	80.000,0
03.BDI.005.051	Pemanfaatan paket teknologi/supervisi/konsultasi	1,0	paket teknologi/konsultasi	70.000,0	70.000,0	1,0	1,0	1,0	73.000,0	75.000,0	80.000,0





KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
04	Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif				6.000.000,0				6.000.000,0	6.000.000,0	0,0
04.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri		Industri/ IKM/ Miliar USD		6.000.000,0				6.000.000,0	6.000.000,0	0,0
04.QDI.005	Perusahaan Industri yang mendapatkan pembinaan TKDN pada Ekosistem Jasa Industri EPC Nasional	30	Industri		6.000.000,0	30	30	0	6.000.000,0	6.000.000,0	0,0
04.QDI.005.051	Pengembangan Ekosistem Jasa Industri EPC Nasional	30,0	Perusahaan industri	200.000,0	6.000.000,0	30,0	30,0	0,0	6.000.000,0	6.000.000,0	0,0
05	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang jasa industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan				138.962.451,0				74.898.315,0	81.990.352,0	2.005.797,0
05.ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM		Rekomendasi Kebijakan/ Kajian		3.000.000,0				3.000.000,0	0,0	0,0
05.ABK.005	Kebijakan Teknis Jasa Industri	1	Rekomendasi Kebijakan		3.000.000,0	1	1	0	3.000.000,0	0,0	0,0
05.ABK.005.051	Kebijakan Teknis Jasa Industri	1,0	Rekomendasi Kebijakan	3.000.000,0	3.000.000,0	1,0	1,0	0,0	3.000.000,0	0,0	0,0
05.AEC	Kerja sama		Kesepakatan/ Dokumen/ Kegiatan		283.130,0				313.130,0	313.130,0	313.130,0
05.AEC.004	Kerjasama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis Industri Keramik dan Mineral Nonlogam	3	Dokumen		60.000,0	3	3	4	90.000,0	90.000,0	90.000,0
05.AEC.004.051	Kerjasama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis BBSPIKMN	3,0	Kesepakatan	20.000,0	60.000,0	3,0	3,0	4,0	90.000,0	90.000,0	90.000,0
05.AEC.005	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim	0	Dokumen		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
05.AEC.005.051	Kerjasama Peningkatan Layanan Jasa Teknis Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim	0,0	Dokumen	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05.AEC.007	Kerjasama Pemanfaatan teknologi dan layanan teknis industri Logam dan Mesin	2	Dokumen		223.130,0	2	2	0	223.130,0	223.130,0	223.130,0
05.AEC.007.051	Kerja Sama Pemanfaatan teknologi dan Layanan Teknis	2,0	Dokumen	111.565,0	223.130,0	2,0	2,0	2,0	223.130,0	223.130,0	223.130,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
05.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi		orang		600.000,0				650.000,0	700.000,0	750.000,0
05.AEF.002	Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Teknis Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim	200	orang		600.000,0	200	200	200	650.000,0	700.000,0	750.000,0
05.AEF.002.051	Sosialisasi Layanan Jasa Teknis	200,0	Orang	3.000,0	600.000,0	200,0	200,0	200,0	650.000,0	700.000,0	750.000,0
05.AEF.007	Sosialisasi dan Diseminasi Kebijakan Jasa Industri Pusat OPTIKJI	0	orang		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
05.AEF.007.051	Sosialisasi dan Diseminasi Kebijakan Jasa Industri	0,0	Orang	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05.BAD	Pelayanan Publik kepada industri		Industri		11.049.321,0				935.185,0	977.222,0	942.667,0
05.BAD.041	Jasa Pelayanan Pemeriksa dan Pengujian Produk Halal Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim	155	Industri		400.000,0	160	165	170	420.000,0	440.000,0	460.000,0
05.BAD.041.051	Jasa Pelayanan Pemeriksa dan Pengujian Produk Halal	155,0	Industri	2.580,6	400.000,0	160,0	165,0	170,0	420.000,0	440.000,0	460.000,0
05.BAD.047	Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri	8	Industri		10.649.321,0	9	8	1	515.185,0	537.222,0	482.667,0
05.BAD.047.051	Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri	1,0	Industri	10.200.000,0	10.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05.BAD.047.051	Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri	7,0	Industri	64.188,7	449.321,0	9,0	8,0	1,0	515.185,0	537.222,0	482.667,0
05.PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM		Rekomendasi Kebijakan/ Kajian		0,0				0,0	0,0	0,0
05.PBK.001	Perumusan Regulasi Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	0	Rekomendasi Kebijakan		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
05.PBK.001.051	Audit Teknologi Industri/Penjaminan Resiko	0,0	Rekomendasi Kebijakan	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05.PBK.001.052	Monev Implementasi Rancang Bangun Perekayasaan Industri dengan stakeholder	0,0	Rekomendasi kebijakan	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05.PBK.001.053	Penilaian Teknologi yang dapat diterapkan di IKM	0,0	Rekomendasi kebijakan	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05.PBK.003	Kebijakan Teknis Jasa Industri	0	Rekomendasi Kebijakan		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
05.PBK.003.051	Kebijakan Teknis Jasa Industri	0,0	Rekomendasi kebijakan	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05.PDA	Standarisasi Produk		produk/ Ekor/ Peralatan/ Rekomendasi/ Standar		0,0				0,0	0,0	0,0
05.PDA.001	Pengembangan Bahan acuan standar	0	produk		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
05.PDA.001.051	Pengembangan bahan acuan standar (standard reference material) berbasis karet dan Lembaga Produsen Bahan Acuan (PBA)	0,0	Produk	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05.QAD	Pelayanan Publik kepada industri		Industri		0,0				0,0	0,0	0,0
05.QAD.001	Jasa pelayanan teknis pengujian dan sertifikasi	0	Industri		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
05.QAD.001.051	Penguatan Lembaga Pengujian dan Sertifikasi Produk BSPJI Padang dalam rangka Penerapan SNI Wajib AMDK	0,0	Layanan	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05.RAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan		Unit/ IKM/ Miliar USD		104.030.000,0				60.000.000,0	70.000.000,0	0,0
05.RAH.001	Peralatan Fasilitas Laboratorium/Workshop/Layanan	45	Unit		104.030.000,0	25	30	0	60.000.000,0	70.000.000,0	0,0
05.RAH.001.051	Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/layanan publik	25,0	Unit	4.161.200,0	104.030.000,0	25,0	30,0	0,0	60.000.000,0	70.000.000,0	0,0
05.RAH.002	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan industri agro	0	Unit		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
05.RAH.002.051	Pengembangan layanan Uji Masa Simpan Pangan	0,0	Unit	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05.RAH.002.052	Pengembangan layanan Penyedia Bahan Acuan (PBA)	0,0	Unit	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05.RAH.002.053	Modernisasi Peralatan Laboratorium Pengujian	0,0	Unit	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05.RBL	Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan		unit/ Ruas		20.000.000,0				10.000.000,0	10.000.000,0	0,0
05.RBL.001	Gedung Layanan Publik/Laboratorium yang direnovasi	5	unit		20.000.000,0	5	5	0	10.000.000,0	10.000.000,0	0,0
05.RBL.001.051	Renovasi Gedung Layanan Publik/Laboratorium	5,0	Unit	4.000.000,0	20.000.000,0	5,0	5,0	0,0	10.000.000,0	10.000.000,0	0,0











































KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025											
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	
05.RAH.002	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan industri agro		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05.RAH.002.051	Pengembangan layanan Uji Masa Simpan Pangan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05.RAH.002.052	Pengembangan layanan Penyedia Bahan Acuan (PBA)	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05.RAH.002.053	Modernisasi Peralatan Laboratorium Pengujian	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05.RBL	Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan		20.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.000.000,0
05.RBL.001	Gedung Layanan Publik/Laboratorium yang direnovasi		20.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.000.000,0
05.RBL.001.051	Renovasi Gedung Layanan Publik/Laboratorium	Utama	20.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.000.000,0
<b>Total</b>			<b>444.954.881,0</b>	<b>90.573.313,0</b>	<b>319.381.496,0</b>	<b>0,0</b>	<b>854.909.690,0</b>							

Jakarta, 30 Januari 2024

Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri

Sidik Herman  
NIP. 197609092005021001

## REKAP 3: KEGIATAN K/L

### RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

#### TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. PROGRAM : WA - Program Dukungan Manajemen
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Terwujudnya Tata Kelola Kementerian yang Efektif dan Efisien  
02 - Meningkatnya Penggunaan Produk dan Industri Halal Dalam Negeri  
03 - Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Andal dan Efektivitas Publikasi Kinerja Industri  
04 - Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian  
06 - Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian
4. KEGIATAN : 6042 - Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 22 - Badan Standardisasi Dan Kebijakan Jasa Industri

#### 6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Terwujudnya ASN BSKJI yang profesional		489.013.794,0
01.01	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	71	
02	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik		8.378.979,0
02.01	Satker yang memperoleh Indeks layanan publik minimal B	65	
02.02	Sistem Informasi Pelayanan Publik BSKJI yang Terpadu dan Terintegrasi	100	
02.03	Implementasi kerja sama	75	
03	Penguatan akuntabilitas organisasi		122.066.873,0
03.01	Satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A	75	
03.02	Satker yang memperoleh nilai laporan keuangan minimal 90	72	
04	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri		33.046.082,0
04.01	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Lingkungan BSKJI	80	
05	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien		0,0
05.01	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92,5	
Total			652.505.728,0

#### 7. RINCIAN KEGIATAN

































































KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta								1.000.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kota Surabaya								197.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur								685.367,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru								0,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Kota Samarinda								0,0
	<b>051 - Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan</b>										892.000,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta								700.000,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang								192.000,0
	<b>051 - Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan</b>										5.300.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung								2.500.000,0
		Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								1.000.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang								800.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kota Surabaya								1.000.000,0
<b>Total</b>											<b>652.505.728,0</b>

**B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)**

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Terwujudnya ASN BSKJI yang profesional				489.013.794,0				511.369.722,0	511.060.420,0	446.509.752,1
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/ Laporan/ Dokumen/ Rekomendasi/ Unit		474.467.232,0				496.529.927,0	496.013.771,0	433.861.037,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran	25	Layanan		474.467.232,0	25	25	19	496.529.927,0	496.013.771,0	433.861.037,0
01.EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	25,0	Layanan	11.966.806,6	299.170.165,0	25,0	24,0	19,0	311.722.225,0	308.539.520,0	269.850.306,0
01.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	25,0	Layanan	4.183.127,4	104.578.186,0	25,0	24,0	19,0	108.533.945,0	106.386.259,0	85.236.892,0
01.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	11,0	Layanan	885.536,5	9.740.902,0	11,0	10,0	10,0	11.640.556,0	11.627.892,0	11.323.839,0
01.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	9,0	Layanan	6.775.331,0	60.977.979,0	9,0	9,0	6,0	64.633.201,0	69.460.100,0	67.450.000,0
01.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		Orang/ Layanan/ Rekomendasi		14.546.562,0				14.839.795,0	15.046.649,0	12.648.715,1
01.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	1009	Orang		4.328.751,0	1020	975	871	4.417.018,0	4.506.537,0	2.475.154,8
01.EBC.954.051	Pengelolaan/Manajemen SDM	862,0	Orang	4.128,9	3.559.121,0	874,0	820,0	706,0	3.596.018,0	3.614.237,0	1.491.154,8
01.EBC.954.051	Pengelolaan/Manajemen SDM	70,0	Orang	731,4	51.200,0	70,0	70,0	80,0	63.000,0	83.500,0	94.000,0
01.EBC.954.051	Pengelolaan/Manajemen SDM	102,0	Orang	7.043,4	718.430,0	102,0	102,0	103,0	758.000,0	808.800,0	890.000,0
01.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	1698	Orang		10.217.811,0	1725	1655	1525	10.422.777,0	10.540.112,0	10.173.560,3
01.EBC.996.051	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM	502,0	Orang	7.148,4	3.588.500,0	531,0	549,0	383,0	4.392.500,0	4.360.625,0	3.979.406,0
01.EBC.996.051	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM	432,0	Orang	8.297,5	3.584.538,0	420,0	425,0	435,0	3.005.369,0	3.091.695,0	3.144.154,3
01.EBC.996.051	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM	548,0	Orang	5.556,2	3.044.773,0	556,0	562,0	530,0	3.024.908,0	3.087.792,0	3.050.000,0
02	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik				8.378.979,0				8.838.532,0	5.581.208,0	2.723.369,4
02.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		Dokumen/ Layanan/ Laporan/ Rekomendasi		8.378.979,0				8.838.532,0	5.581.208,0	2.723.369,4
02.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	28	Dokumen		2.115.701,0	27	26	22	2.265.026,0	1.653.649,0	1.336.940,4
02.EBD.961.051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP	17,0	Dokumen	90.583,4	1.539.917,0	17,0	16,0	13,0	1.665.979,0	1.011.032,0	741.940,4
02.EBD.961.051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP	2,0	Dokumen	42.500,0	85.000,0	2,0	2,0	2,0	85.000,0	90.000,0	95.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
02.EBD.961.051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP	7,0	Dokumen	70.112,0	490.784,0	7,0	7,0	5,0	514.047,0	552.617,0	500.000,0
02.EBD.965	Layanan Audit Internal	20	Dokumen		5.651.186,0	20	13	6	5.887.186,0	2.903.186,0	654.000,0
02.EBD.965.051	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan	9,0	Dokumen	242.354,0	2.181.186,0	9,0	9,0	2,0	2.287.186,0	2.493.186,0	244.000,0
02.EBD.965.051	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan	10,0	Dokumen	347.000,0	3.470.000,0	10,0	4,0	4,0	3.600.000,0	410.000,0	410.000,0
02.EBD.965.051	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan	0,0	Dokumen	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	18	Dokumen		612.092,0	17	17	12	686.320,0	1.024.373,0	732.429,0
02.EBD.974.051	Penyelenggaraan Kearsipan	12,0	Laporan	29.972,1	359.665,0	12,0	11,0	8,0	402.262,0	704.093,0	424.429,0
02.EBD.974.051	Penyelenggaraan Kearsipan	2,0	Laporan	47.500,0	95.000,0	2,0	2,0	2,0	100.000,0	100.000,0	115.000,0
02.EBD.974.051	Penyelenggaraan Kearsipan	4,0	Laporan	39.356,8	157.427,0	4,0	4,0	2,0	184.058,0	220.280,0	193.000,0
03	Penguatan akuntabilitas organisasi				122.066.873,0				172.626.598,4	218.573.422,8	5.943.704,6
03.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/ Laporan/ Dokumen/ Rekomendasi/ Unit		2.940.300,0				3.146.888,0	3.156.899,0	153.254,0
03.EBA.957	Layanan Hukum	1	Layanan		1.990.000,0	1	1	0	1.990.000,0	1.990.000,0	0,0
03.EBA.957.051	Pengelolaan Layanan Hukum	1,0	Layanan	1.990.000,0	1.990.000,0	1,0	1,0	0,0	1.990.000,0	1.990.000,0	0,0
03.EBA.962	Layanan Umum	5	Layanan		950.300,0	5	5	2	1.156.888,0	1.166.899,0	153.254,0
03.EBA.962.051	Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga	3,0	Layanan	271.833,3	815.500,0	3,0	3,0	0,0	1.018.000,0	1.023.000,0	0,0
03.EBA.962.051	Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga	0,0	Layanan	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.EBA.962.051	Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga	1,0	Layanan	85.880,0	85.880,0	1,0	1,0	1,0	88.500,0	92.000,0	100.000,0
03.EBA.962.052	Fasilitasi Pengembangan Layanan Jasa	1,0	Layanan	48.920,0	48.920,0	1,0	1,0	1,0	50.388,0	51.899,0	53.254,0
03.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		Dokumen/ Layanan/ Laporan/ Rekomendasi		119.126.573,0				169.479.710,4	215.416.523,8	5.790.450,6
03.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	36	Dokumen		8.337.051,0	36	36	27	8.554.601,4	8.656.636,8	1.773.889,1
03.EBD.952.051	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	28,0	Dokumen	128.717,8	3.604.099,0	28,0	28,0	24,0	3.620.342,0	3.701.993,0	1.449.138,4
03.EBD.952.051	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	3,0	Dokumen	37.468,0	112.404,0	3,0	3,0	3,0	132.644,4	143.408,8	159.749,7
03.EBD.952.051	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	4,0	Dokumen	55.137,0	220.548,0	4,0	4,0	3,0	301.615,0	311.235,0	165.001,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
03.EBD.952.052	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran PIH	1,0	Dokumen	900.000,0	900.000,0	1,0	1,0	0,0	1.000.000,0	1.000.000,0	0,0
03.EBD.952.053	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran POPTIKJI	1,0	Dokumen	1.500.000,0	1.500.000,0	1,0	1,0	0,0	1.500.000,0	1.500.000,0	0,0
03.EBD.952.054	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran P2SI	1,0	Dokumen	1.000.000,0	1.000.000,0	1,0	1,0	0,0	1.000.000,0	1.000.000,0	0,0
03.EBD.952.055	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran P4SI	1,0	Dokumen	1.000.000,0	1.000.000,0	1,0	1,0	0,0	1.000.000,0	1.000.000,0	0,0
03.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	62	Dokumen		6.491.371,0	62	62	53	6.524.148,0	2.194.897,0	2.112.895,0
03.EBD.953.051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	47,0	Laporan	82.960,7	3.899.152,0	44,0	43,0	36,0	3.892.282,0	1.450.762,0	1.307.895,0
03.EBD.953.051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	5,0	Laporan	48.228,0	241.140,0	7,0	7,0	7,0	253.000,0	340.000,0	350.000,0
03.EBD.953.051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	8,0	Laporan	43.884,9	351.079,0	8,0	8,0	7,0	378.866,0	404.135,0	455.000,0
03.EBD.953.054	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi P2SI	1,0	Laporan	500.000,0	500.000,0	1,0	0,0	0,0	500.000,0	0,0	0,0
03.EBD.953.055	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi P4SI	1,0	Laporan	1.500.000,0	1.500.000,0	1,0	0,0	0,0	1.500.000,0	0,0	0,0
03.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	36	Dokumen		104.298.151,0	35	35	31	154.400.961,0	204.564.990,0	1.903.666,5
03.EBD.955.051	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	23,0	Laporan	4.503.084,7	103.570.947,0	23,0	23,0	19,0	153.627.206,0	203.713.725,0	1.018.666,5
03.EBD.955.051	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	3,0	Laporan	40.000,0	120.000,0	3,0	3,0	3,0	120.000,0	135.000,0	135.000,0
03.EBD.955.051	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	10,0	Laporan	60.720,4	607.204,0	10,0	10,0	9,0	653.755,0	716.265,0	750.000,0
04	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri				33.046.082,0				26.133.334,0	28.630.278,0	19.267.451,4
04.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/ Laporan/ Dokumen/ Rekomendasi/ Unit		6.707.010,0				7.231.962,0	7.216.616,0	4.293.577,3
04.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	22	Layanan		6.707.010,0	22	22	17	7.231.962,0	7.216.616,0	4.293.577,3
04.EBA.958.051	Pengelolaan Data dan Informasi	14,0	Layanan	291.568,4	4.081.957,0	14,0	13,0	11,0	4.308.981,0	4.451.423,0	1.461.821,3
04.EBA.958.051	Pengelolaan Data dan Informasi	2,0	Layanan	217.750,0	435.500,0	2,0	2,0	2,0	535.500,0	540.500,0	545.500,0
04.EBA.958.051	Pengelolaan Data dan Informasi	6,0	Layanan	239.548,0	1.437.288,0	6,0	5,0	4,0	1.516.800,0	1.262.000,0	1.321.450,0
04.EBA.958.052	Pengelolaan Majalah/ Jurnal Ilmiah/ Buku	3,0	Layanan	37.000,0	111.000,0	3,0	3,0	3,0	140.000,0	150.000,0	160.000,0
04.EBA.958.052	Pengelolaan Majalah/ Jurnal Ilmiah/ Buku	1,0	Layanan	70.000,0	70.000,0	2,0	2,0	2,0	110.000,0	125.000,0	125.000,0
04.EBA.958.052	Pengelolaan Majalah/ Jurnal Ilmiah/ Buku	1,0	Layanan	14.400,0	14.400,0	1,0	1,0	1,0	14.400,0	14.400,0	14.400,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
04.EBA.958.053	Penerbitan Buku dan Majalah	1,0	Layanan	40.000,0	40.000,0	1,0	1,0	1,0	50.000,0	60.000,0	70.000,0
04.EBA.958.053	Penerbitan Buku dan Majalah	0,0	Layanan	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.EBA.958.054	Pelaksanaan Pemasaran/Promosi/ Pameran/Publikasi Layanan Teknis	3,0	Layanan	83.901,7	251.705,0	3,0	3,0	2,0	253.621,0	305.633,0	307.746,0
04.EBA.958.054	Pelaksanaan Pemasaran/Promosi/ Pameran/Publikasi Layanan Teknis	1,0	Layanan	70.160,0	70.160,0	1,0	1,0	1,0	107.660,0	112.660,0	112.660,0
04.EBA.958.054	Pelaksanaan Pemasaran/Promosi/ Pameran/Publikasi Layanan Teknis	1,0	Layanan	175.000,0	175.000,0	1,0	1,0	0,0	175.000,0	175.000,0	175.000,0
04.EBA.958.055	Penyelenggaraan Seminar/Workshop/ Temu Pelanggan	0,0	Layanan	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.EBA.958.055	Penyelenggaraan Seminar/Workshop/ Temu Pelanggan	0,0	Layanan	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.EBA.958.055	Penyelenggaraan Seminar/Workshop/ Temu Pelanggan	1,0	Layanan	20.000,0	20.000,0	1,0	1,0	0,0	20.000,0	20.000,0	0,0
04.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Unit/ m2/ Paket		26.339.072,0				18.901.372,0	21.413.662,0	14.973.874,1
04.EBB.951	Layanan Sarana Internal	642	Unit		18.264.705,0	608	622	619	13.748.444,0	15.039.556,0	12.076.874,1
04.EBB.951.051	Pengadaan Kendaraan Bermotor Operasional	14,0	Unit	173.413,3	2.427.786,0	21,0	31,0	30,0	1.350.000,0	1.400.000,0	500.000,0
04.EBB.951.051	Pengadaan Kendaraan Bermotor Operasional	0,0	Unit	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.EBB.951.051	Pengadaan Kendaraan Bermotor Operasional	0,0	Unit	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.EBB.951.052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	159,0	Unit	26.640,3	4.235.800,0	92,0	106,0	113,0	3.211.000,0	3.242.750,0	2.452.263,0
04.EBB.951.052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	36,0	Unit	18.209,9	655.557,0	37,0	39,0	41,0	710.000,0	735.000,0	810.000,0
04.EBB.951.052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	73,0	Unit	21.081,6	1.538.960,0	88,0	93,0	98,0	1.855.129,0	2.012.589,0	2.140.000,0
04.EBB.951.053	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran	276,0	Unit	27.326,5	7.542.126,0	271,0	287,0	195,0	3.999.456,0	3.985.101,0	3.224.611,1
04.EBB.951.053	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran	55,0	Unit	21.818,2	1.200.000,0	41,0	46,0	53,0	1.195.000,0	1.255.000,0	1.290.000,0
04.EBB.951.053	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran	23,0	Unit	28.890,3	664.476,0	56,0	86,0	61,0	1.427.859,0	2.409.116,0	1.660.000,0
04.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	9	Unit		8.074.367,0	7	7	4	5.152.928,0	6.374.106,0	2.897.000,0





KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
04.EBA.958.053	Penerbitan Buku dan Majalah	Utama	40.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40.000,0
04.EBA.958.054	Pelaksanaan Pemasaran/Promosi/ Pameran/Publikasi Layanan Teknis	Utama	251.705,0	70.160,0	175.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	496.865,0
04.EBA.958.055	Penyelenggaraan Seminar/Workshop/ Temu Pelanggan	Utama	0,0	0,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0
04.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		16.088.079,0	2.747.557,0	7.503.436,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26.339.072,0
04.EBB.951	Layanan Sarana Internal		14.205.712,0	1.855.557,0	2.203.436,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.264.705,0
04.EBB.951.051	Pengadaan Kendaraan Bermotor Operasional	Utama	2.427.786,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.427.786,0
04.EBB.951.052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	Utama	4.235.800,0	655.557,0	1.538.960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.430.317,0
04.EBB.951.053	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran	Pendukung	7.542.126,0	1.200.000,0	664.476,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.406.602,0
04.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		1.882.367,0	892.000,0	5.300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.074.367,0
04.EBB.971.051	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	Utama	1.882.367,0	892.000,0	5.300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.074.367,0
Total			555.829.179,0	20.823.401,0	75.853.148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	652.505.728,0

Jakarta, 30 Januari 2024

Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri

Sidik Herman  
NIP. 197609092005021001